



IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROYEK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN OLEH
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KARANG BESUKI
DALAM PENYALURAN KREDIT GUNA MENCAPAI
SELF-SUSTAINABLE DI KOTA MALANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Niaga
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Terima kasih :
No. Induk :
Oleh :
Pengkatalog :

13	10/13
	SAR
	i

FITRI AMILLIA SARI

NIM. 020910202041

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NIAGA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2007**



**IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROYEK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN OLEH
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KARANG BESUKI
DALAM PENYALURAN KREDIT GUNA MENCAPAI
SELF-SUSTAINABLE DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Niaga (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

FITRI AMILLIA SARI
020910202041

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NIAGA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan dengan setulus hati kepada:

Jantung hidupku “Bapak dan ibu” tercinta, terima kasih atas untaian do’a-
do’anya yang dipanjatkan dengan kasih sayang dan kesabaran yang
membuatku tegar menghadapi hidup

Masku Dani “Goshong” tersayang dengan semua dukungan dan semangatnya

”Aminglia” dengan tekad dan semangatmu telah membangun asaku

Mbak Nung dan Hj. Siti Fatimah atas naschat dan do’anya yang tidak pernah
putus

My soulmate “NI” kemanapun, dimanapun dan kapanpun kau ada saat
kubutuhkan

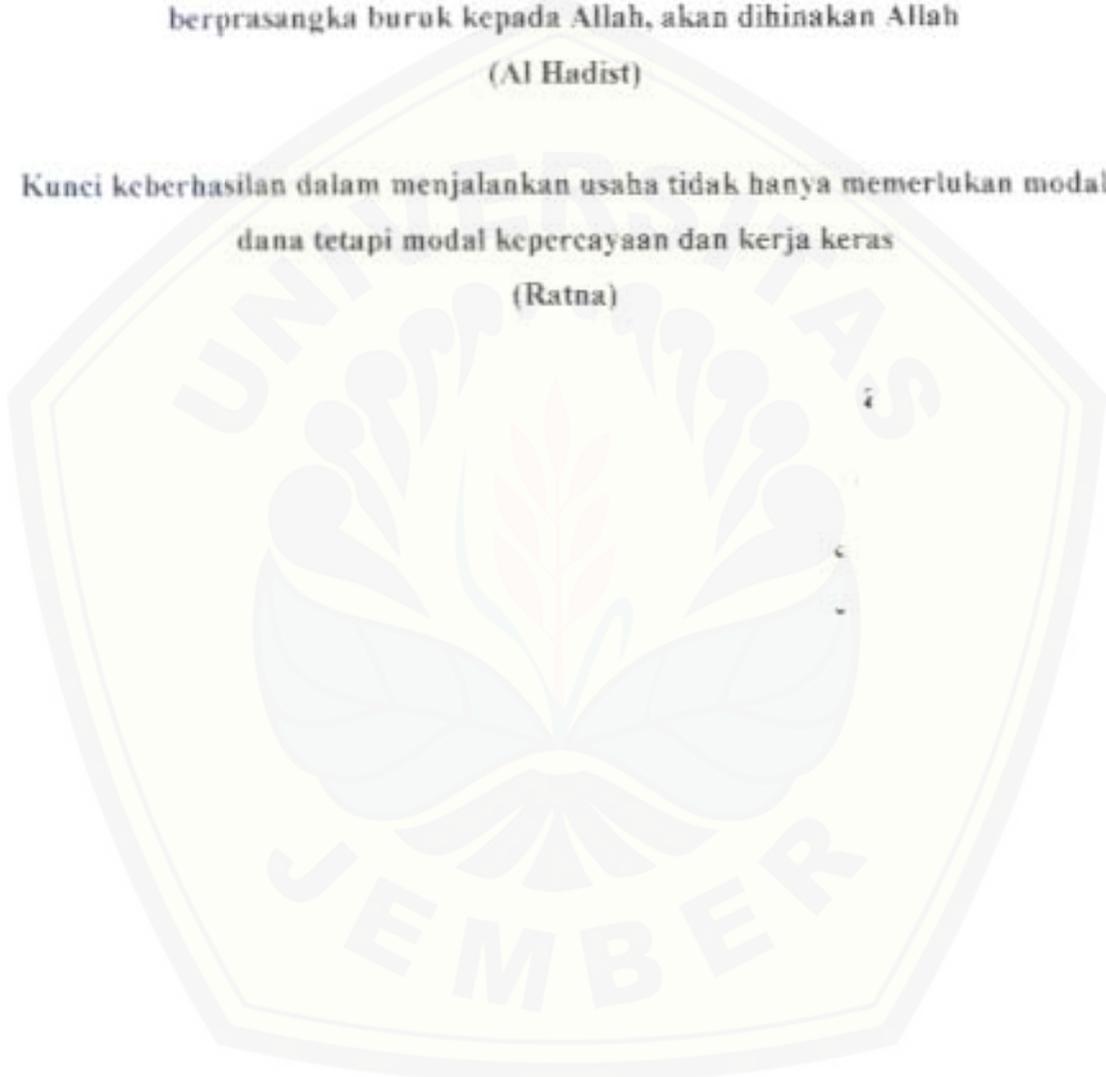
MOTTO

Tetaplah berprasangka baik kepada Allah, sebab orang yang berprasangka baik akan diberi ganjaran kebaikan yang tak putus-putusnya, sedangkan orang yang berprasangka buruk kepada Allah, akan dihinakan Allah

(Al Hadist)

Kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha tidak hanya memerlukan modal dana tetapi modal kepercayaan dan kerja keras

(Ratna)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Amillia Sari

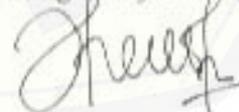
NIM : 020910202041

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "*Implementasi Strategi dan Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan oleh BKM Karangbesuki dalam Penyuluran Kredit guna Mencapai Self-Sustainable di Kota Malang*" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari kenyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Januari 2007

Yang menyatakan,



Fitri Amillia Sari
020910202041

PENGESAHAN

Skripsi ini diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Februari 2007

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Ketua Penguji,



Drs. Djoko Poernomo, M.Si
NIP. 131 660 777

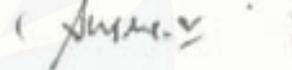
Sekretaris Penguji,



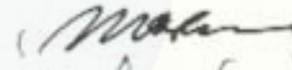
Dra. Hj. Sulistyarningsih
NIP. 130 802 221

Anggota:

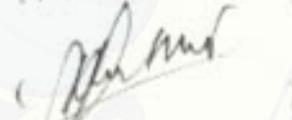
1. Drs. H. Sugeng Iswono, MA



2. Drs. I Ketut Mastika, MM



3. Drs. Suhartono, M.P



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Df. H. Ung Nasdia B.S.W., M.S

NIP. 130 674 836

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Implementasi Strategi dan Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Karangbesuki dalam Penyaluran Kredit guna Mencapai Self-Sustainable di Kota Malang”*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Penyusunan skripsi ini banyak memperoleh saran, petunjuk dan bimbingan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada

1. Dr. H. Ung Nasdia B.S.W, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta Pembantu Dekan I, II, dan III
2. Drs. Sutrisno, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Drs. Suhartono, M.S selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Niaga
4. Dra. Hj Sulistyaningsih selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Sugeng Iswono, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan tulus ikhlas memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. H. Mud'har Syarifuddin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama ini.
6. Tim Peneliti dalam Program *Research Grant* dari PHK A2 Tahun ke 3 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terlibat langsung dalam *Penelitian Payung* sehingga menghasilkan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen atau Staff pengajar dan seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Seluruh staf UPK-BKM di Kota Malang, terimakasih atas kerjasamanya dalam mendukung penulis menyusun skripsi ini.
9. *My Best Partner "Ima", finally we finished it.*
10. Rumah kedua ku, "Mabes Jawa VII/05", atas semua keceriaan, kehangatan serta dukungan kalian semua.
11. Keluarga besar "Karimata 99" : Pakdhe, Budhe, Suwen, Sudin dan Sunil yang selalu membantuku dalam segala hal.
12. Mbak Ratna dan semua sahabatku tersayang di Jember : A wind, Nchus, Nia, Rama, Antok, Buat, Suric (makasih dah temenin aku ngetik ampe' malem...), Mr. Peno', Pancing, Lilik dan teman-teman yang lain, maaf tidak bisa kusebutkan satu persatu.
13. Temen-temen di Malang: Mbak Eva, Alvin, Rizky, Yudha, dll.. terimakasih atas bantuannya.

Tidak adanya kesempurnaan di dunia membuat penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi mereka yang membutuhkan.

Jember, 31 Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Operasionalisasi Konsep.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	8
1.5.2 Tahap Persiapan.....	8
1.5.3 Tahap Pengumpulan Data	11
1.5.4 Tahap Keabsahan Data.....	12
1.6 Tahap Analisis Data.....	12
1.7 Tahap Penarikan Kesimpulan	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Strategi	14
2.1.2 Kebijakan	21
2.1.3 Pasar Kredit Mikro.....	22
2.1.4 Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)	26

2.1.5 Lembaga Keuangan Mikro.....	28
2.1.6 Kredit.....	29
2.1.7 <i>Self-Sustainable</i>	31
2.2 Penelitian Terdahulu	33
BAB 3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	35
3.1 Gambaran Umum	35
3.1.1. Gambaran Umum Kota Malang	35
3.1.2. Gambaran Umum Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).....	37
3.2 Pembahasan	56
3.2.1 Strategi BKM	56
3.2.2 Implementasi Strategi Penyaluran Kredit	58
3.2.3 Kebijakan BKM dalam Mencapai <i>Self-Sustainability</i>	63
3.3 Kinerja BKM Karangbesuki.....	73
BAB 4. KESIMPULAN	78
DAFTAR PUSTAKA	-
LAMPIRAN	-

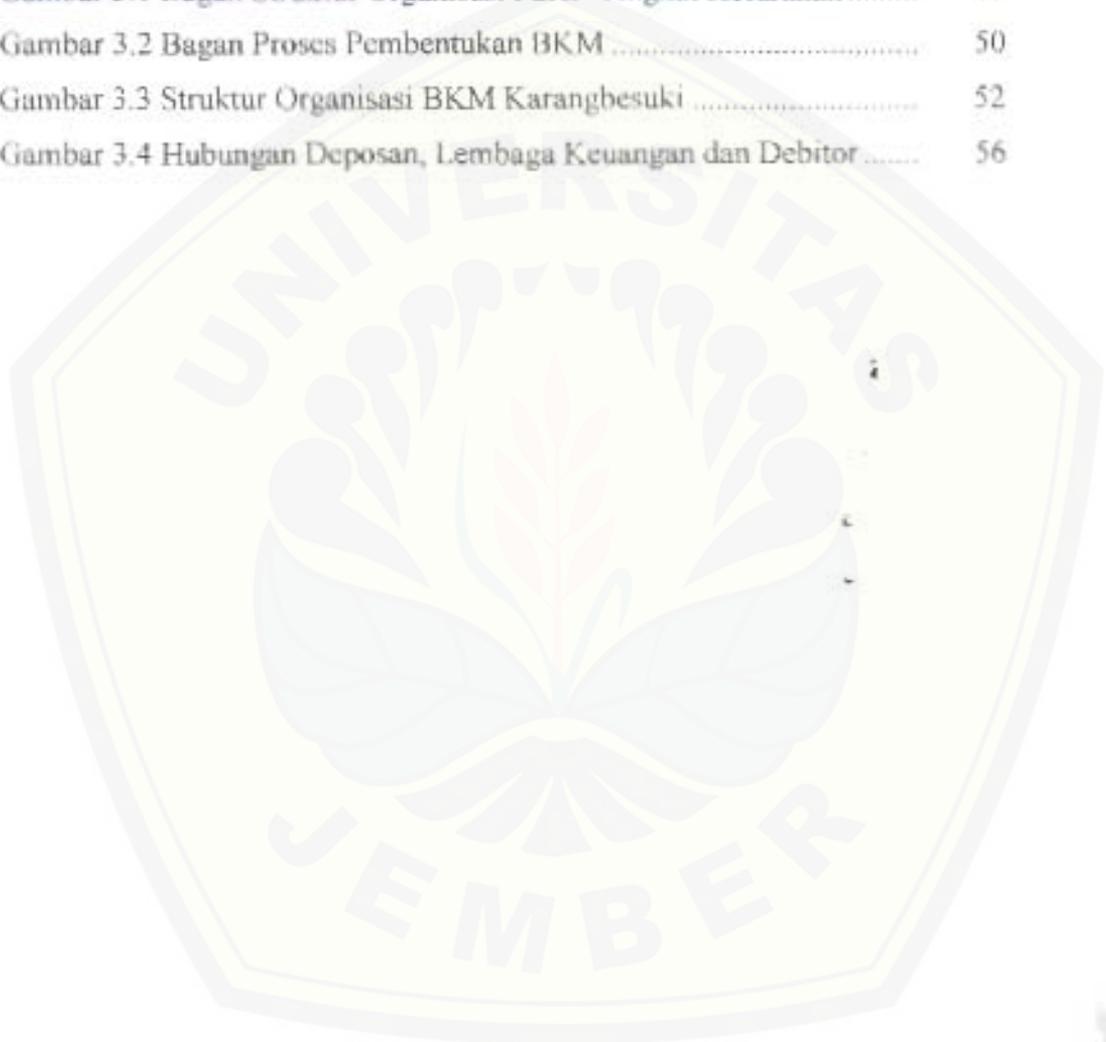
DAFTAR TABEL.

Tabel 2.1 Karakteristik Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank	24
Tabel 3.1 Matriks Implementasi Strategi Penyaluran Kredit.....	62
Tabel 3.2 Kinerja BKM Karangbesuki	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Lima Kekuatan Persaingan	15
Gambar 2.2 Empat Strategi Generik	16
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi P2KP Tingkat Kelurahan	47
Gambar 3.2 Bagan Proses Pembentukan BKM	50
Gambar 3.3 Struktur Organisasi BKM Karangbesuki	52
Gambar 3.4 Hubungan Depositor, Lembaga Keuangan dan Debitur	56



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Berita Acara Pembentukan KSM
- Lampiran 3. Daftar Nama dan Keanggotaan KSM
- Lampiran 4. Usulan KSM Kegiatan Usaha/Ekonomi
- Lampiran 5. Kelayakan Pengguna Dana P2KP
- Lampiran 6. Daftar Alokasi Dana Pinjaman dari KSM Kepada Anggotanya
- Lampiran 7. Angsuran Pokok dan Jasa
- Lampiran 8. Daftar Anggota KSM
- Lampiran 9. Surat Perjanjian Pinjaman
- Lampiran 10. Surat Pernyataan Bersama
- Lampiran 11. Butir-Butir Kesepakatan
- Lampiran 12. Pernyataan Tanggung Renteng
- Lampiran 13. Surat Pengakuan Hutang
- Lampiran 14. Formulir Isian Kartu Keluarga
- Lampiran 15. Surat Perjanjian Kesanggupan Melunasi Hutang
- Lampiran 16. Profil KSM
- Lampiran 17. Surat Ijin Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 18. Surat Ijin Penelitian BAKESBANG
- Lampiran 19. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 20. Surat Ijin Penelitian PHK A2



1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya serta aspek-aspek lainnya. Kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antar golongan penduduk. Kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebih dengan tingkat produktivitas yang rendah, serta ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, dari tahun 2002 hingga 2004 angka kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan *trend* menurun. Pada tahun 2002, jumlah penduduk miskin sebesar 7.181.755 jiwa atau 20,34 % dan menurun pada tahun 2003 menjadi 7.064.289 jiwa atau 19,52 %⁴. Kemudian pada tahun 2004, menurun lagi menjadi 6.979.565 jiwa atau 19,40 % dari total penduduk yang berjumlah 36.398.345 jiwa (Susenas 2004). Setelah pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Maret dan Oktober 2005 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Jawa Timur jumlah keluarga miskin (Gakin) mencapai 3.311.903 KK (*by name by address*). Jika diasumsikan tiap Gakin terdiri dari 5 (lima) orang, maka jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 16.559.515 jiwa. Hal itu menunjukkan suatu peningkatan angka kemiskinan yang tinggi dan menjadi masalah krusial serta mendesak yang harus ditangani. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah melalui Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) telah menetapkan sasaran nasional penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Tingkat pendapatan yang diterima dapat dipakai sebagai ukuran kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan karena kurang tersedianya akses, kemampuan sumber daya dan faktor produksi yang mendukung mereka. Salah

satu faktor produksi yang mendukung mereka adalah modal. Sumber permodalan dapat diperoleh antara lain dari kredit. Tetapi, selama ini masyarakat miskin masih sulit untuk mendapatkan akses kredit. Salah satu sebabnya karena masyarakat miskin umumnya dipandang tidak memenuhi kualifikasi perbankan alias tidak *bankable*, serta sulitnya mereka dalam hal penyediaan agunan (*lack of collateral*). Sementara itu, lembaga keuangan formal seperti bank dengan ketat mengutamakan syarat *bankable* tersebut. Selain itu, masyarakat miskin juga hanya dianggap sebagai beban. Padahal jika kita menghentikan anggapan buruk ini dan memandang mereka sebagai para wirausahawan yang tangguh dan kreatif, maka banyak peluang baru akan terbuka. Oleh karena itu diperlukan pendekatan baru yang lebih baik dan kreatif yang melibatkan kemitraan di antara mereka, dan juga untuk mengubah kemiskinan menjadi lebih baik lagi.

Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha, sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan dapat digunakan kembali untuk membayar kreditnya serta melakukan pemupukan modal. Namun sulitnya akses kredit dari lembaga keuangan formal-Bank membuat mereka lari menggunakan jasa pelayanan lembaga keuangan informal. Bentuk dari sumber-sumber informal ini beraneka ragam, mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain, (Wijono, 2005).

Lembaga-lembaga keuangan informal dalam perkembangannya lebih mengena dikalangan masyarakat miskin mengingat mereka membantu para pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman, maupun keluwesannya pada pencairan kredit yang tidak seketat perbankan. Menurut Benny, dkk (dalam Brata, 2003) Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UKM. Alasan *pertama* adalah karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamika karya. UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga* adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki

keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar. Usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga, Kuncoro (dalam Brata, 2003).

Sumodiningrat (dalam Sutopo, 2005:4) menyatakan bahwa pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Selain itu berkembangnya LKM juga tidak terlepas dari karakteristik LKM yang memberikan kemudahan kepada pelaku UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Adapun karakteristik dari LKM menurut Primahendra (dalam Sutopo, 2005) meliputi: 1) terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutama simpanan dan pinjaman; 2) diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah; dan 3) menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana.

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Robinson (dalam Wijono, 2005) menyatakan "pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan". Jadi salah satu cara untuk pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pemberdayaan lembaga keuangan mikro dengan penyaluran kreditnya kepada para pengusaha mikro yang membutuhkannya.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang disingkat dengan P2KP merupakan proyek yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengembangan usaha produktif, sekaligus sebagai usaha untuk memberdayakan UKM melalui bantuan dana bergulir kredit mikro. P2KP merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan informal dibawah naungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengelolaan dana bergulir sepenuhnya dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang berkedudukan dibawah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Sebagai unsur pengelola sumber daya khususnya keuangan, UPK bertanggung jawab kepada BKM dalam hal pengelolaan keuangan yang disalurkan dan penggulirannya lewat BKM ke

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta menjamin adanya keberlanjutan (*sustainability*) dari dana tersebut. UPK diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan masyarakat yang dikelola atas dasar prinsip profesionalisme serta berdasarkan pedoman pengelolaan dana yang bergulir P2KP.

Anggapan masyarakat mengenai upaya penyaluran kredit mikro yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sering diasumsikan sebagai aktivitas sosial (*charity*) dan bersifat sukarela. Kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa pasar kredit mikro berhubungan langsung dengan nasabah golongan masyarakat menengah ke bawah, seringkali menyebabkan bisnis ini diinterpretasikan selalu membawa misi sosial, membantu golongan masyarakat lemah baik dalam rangka konsumsi maupun produksi yang mereka lakukan. Pandangan seperti ini tidak selayaknya terus dipertahankan. Tuntutan perubahan jaman menghendaki agar aspek *sustainability* bisnis ini dapat dipertahankan, yaitu dengan menghilangkan pandangan bahwa bisnis penyaluran kredit mikro sebagai *charity*. Dengan demikian, pola penyaluran kredit mikro yang dilakukan oleh sektor informal akan membawa dampak positif pada kinerja BKM itu sendiri yaitu menghasilkan laba, serta dapat mewujudkan BKM sebagai lembaga keuangan mikro yang mandiri dan berkelanjutan (*self-sustainable*).

Proyek P2KP ini diluncurkan oleh pemerintah, yaitu Bappenas dan Kementerian Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, sejak tahun 2000. Pendanaannya berasal dari: 1) Kredit dan pinjaman Bank Dunia, melalui *International Development Agency* (IDA) dan kredit *International Bank for Reconstruction Development* (IBRD), 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan APBD Kota/Kabupaten. P2KP Tahap I terbagi dalam tiga periode. Periode pertama dimulai pada tahun 1999-2000, periode kedua pada tahun 2001-2003, dan periode ketiga pada tahun 2003-2005. Pada P2KP tahap I periode pertama dana yang disalurkan adalah sebesar 1,5 M, periode kedua sebesar 2 M dan periode ketiga sebesar 2,5 M. Dana ini disalurkan untuk kecamatan dan kelurahan yang dinilai memiliki mayoritas masyarakat kurang mampu dan besarnya dana bervariasi, tergantung jumlah penduduk dan tingkat kemiskinannya. Pengadaan

P2KP ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan bagi lebih dari 5 juta jiwa atau sekitar 1 juta Kepala Keluarga (KK) masyarakat miskin di wilayah perkotaan di pulau Jawa yang antara lain Kota dan Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso serta memiliki pendapatan perkapita dibawah Upah Minimum Regional (UMR).

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan adalah sangat penting. Peneliti memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian dengan alasan hingga saat ini BKM di Kota Malang masih berjalan dan terus berkembang, serta tingkat keberhasilan BKM terkait dengan kondisi bisnis setempat bagi keberhasilan UMK klien BKM dalam kondisi mandiri-berkelanjutan (*Self-Sustainable*). Selain itu penerima dana bantuan bergulir P2KP di Kota Malang dianggap mampu untuk menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan "Bagaimanakah Implementasi Strategi Dan Kebijakan Pengelola Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Karang Besuki dalam Penyaluran Kredit berdasarkan ketentuan P2KP Guna Mewujudkan BKM Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Yang Mandiri Berkelanjutan (*Self-Sustainability*)?"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui :

- a. Bagaimana BKM Karang Besuki melaksanakan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh P2KP.
- b. Kebijakan operasional pengelola BKM Karang Besuki sebagai implementasi dari strategi P2KP guna mewujudkan BKM yang mandiri berkelanjutan (*Self-Sustainability*).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus memberikan manfaat yang jelas dan kontribusi yang positif bagi perkembangan obyek yang diteliti. Penelitian tidak akan berarti apabila tidak memberikan manfaat sedikitpun. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis

Sebagai suatu pengalaman yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

b. Bagi Akademis

Diharapkan dapat menjadi tambahan serta menambah referensi studi tentang LKM khususnya yang berorientasi bisnis dan sosial.

c. Bagi Pengelola BKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran bagi pengelola BKM mengenai strategi dan kebijakan yang tepat dalam penyaluran kredit bagi pengusaha mikro guna mewujudkan *self-sustainability*, terutama bagi daerah selain Kota Malang yang belum mampu memanfaatkan dana tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan penjabaran dari pengertian suatu konsep yang abstrak ke dalam defisi yang lebih operasional atau konkrit yang digunakan dalam penelitian. Operasionalisasi konsep ini mempunyai tujuan untuk memberikan penjabaran terhadap konsep-konsep yang sifatnya masih abstrak.

Adapun konsep yang perlu dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

a. Strategi

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utamanya akan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah penugasan kembali kepada para pimpinan perusahaan atau organisasi bisnis, baik pada tingkat korporasi maupun tingkat unit bisnis untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama para karyawan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk memformulasikan strategi yang kemudian mengkomunikasikannya dan menerapkannya dalam kegiatan operasional perusahaan yaitu menganalisis faktor internal dan faktor eksternal perusahaan serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, kemudian diformulasikan menjadi kebijakan perusahaan.

c. Lembaga keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

d. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah operasional dari penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah secara konseptual, sehingga diperoleh hasil yang benar-benar dapat dipercaya, akurat, obyektif dan ilmiah.

Menurut Arikunto (2002:42), "Metode penelitian adalah langkah-langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah sehingga mendapatkan suatu kebenaran yang obyektif dan ilmiah". Penelitian akan mendapat hasil yang obyektif, mendekati kebenaran dan jauh dari rekayasa peneliti jika metode yang digunakan dalam penelitian adalah benar.

1.5.1 Tipe dan pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dari kata-kata yang diamati. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1991:3) menyatakan bahwa, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Penelitian ini berkaitan dengan kondisi realitas implementasi strategi penyaluran kredit yang dilaksanakan BKM Karang Besuki di Kota Malang guna mewujudkan *self-sustainability* dalam upayanya untuk mengentas kemiskinan sekaligus memajukan usaha mikro kecil. Penggambaran tersebut dalam bentuk uraian-uraian dan pendapat responden, tabulasi dan beberapa analisis kuantitatif sederhana. Selaras dengan ciri-ciri penelitian kualitatif yang diantaranya bahwa dalam penelitian tersebut informasi yang diperoleh adalah alami, serta langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dari informan terpilih terhadap hal-hal yang ada dalam lingkungan penelitian dan tidak berupa variabel-variabel yang ditentukan.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji konsep-konsep yang ada sebagai variabel, tetapi konsep-konsep yang ada diartikan sebagai alat untuk menginterpretasikan hakekat suatu gejala ataupun kenyataan yang ada dilapangan, serta mengkonseptualisasikan teori yang memiliki abstraksi yang cukup tinggi yang dapat berlaku dalam penelitian-penelitian sejenis pada kondisi tertentu lainnya.

1.5.2 Tahap Persiapan

a. Observasi awal

Observasi awal dilakukan pada BKM Karang Besuki sebagai tempat penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan data awal mengenai masalah yang akan diteliti.

b. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan konsentrasi Kecamatan – kecamatan yang termasuk dalam P2KP Tahap I yang masih beroperasi, alasan :

1. Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Tahap I Tahun 1999-2000 Konsultan Manajemen Wilayah 9 (KMW 9) tahap I Propinsi Jatim yang antara lain Kota dan Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso.
2. Berdasarkan informasi dari pendamping P2KP hingga saat ini BKM Karang Besuki masih berjalan dan terus berkembang, dan menjadi contoh *best practice* BKM di Kota Malang.
3. Wilayah kerja BKM adalah kelurahan sedangkan tingkat keberhasilan BKM terkait dengan kondisi bisnis setempat bagi keberhasilan UMK klien BKM. Oleh karena itu penelitian ini mengambil lokasi yang tidak terlalu menyebar dan agar tidak ada bias kondisi bisnis suatu wilayah yang akan menyebabkan perbedaan yang tajam antar kinerja BKM.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sarana untuk memperkaya teori-teori yang selanjutnya menjadi konsep yang mendasari penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur serta artikel atau jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian sebagai bahan referensi.

d. Karakteristik informan

Berdasarkan realitas sosial dan budaya yang maknawi dan subyektif perspektif, Sanapiah (1991:56) menyatakan:

“Karena penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat unik, kompleks dan ganda, padaya terdapat regularitas atau pola tertentu namun penuh dengan variasi. Karenanya pula kegiatan penelitian seharusnya secara sengaja memburu informasi seluas mungkin kearah keragaman/variasi yang ada”.

Jika dilihat dari karakteristik penelitian kualitatif tersebut, *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan pendekatan diatas. sebab informan yang dibutuhkan adalah orang-orang yang benar-benar

mengetahui tentang kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh BKM selain itu juga mempunyai posisi yang penting. Hal ini bertujuan agar informasi yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sprandel dalam Faisal (1990:57) kriteria dari informan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti antara lain:

1. Subyek telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.
2. subyek masih terlibat dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian dari penelitian.
3. subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung "dikemas" terlebih dahulu.
4. subyek yang mempunyai cukup banyak waktu untuk dimintai informasi.
5. subyek yang sebelumnya masih tergolong "masih asing" dengan peneliti.

Sesuai dengan pertimbangan tersebut, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Nama : Drs. Partono, M.Pd
Umur : 45 tahun
Jabatan : Ketua BKM Karang Besuki
2. Nama : Imam Subiyanto
Umur : 55 tahun
Jabatan : Wakil Ketua BKM Karang Besuki
3. Nama : Drs. Harti KZ, M.Pd
Umur : 50 tahun
Jabatan : Bendahara I
4. Nama : Dra. Irohwati
Umur : 40 tahun
Jabatan : Bendahara II
5. Nama : Theresia T.S, Spd
Umur : 40 tahun
Jabatan : Bendahara III

6. Nama : H.Sukirman
Umur : 46 tahun
Jabatan : Sekretaris

1.5.3 Tahap Pengumpulan Data

Data merupakan bagian yang sangat penting. Data dijadikan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisa suatu masalah. Tahap pengumpulan data diperlukan dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam suatu penelitian. Tahap-tahap pengumpulan data meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimanakah implementasi strategi dalam bentuk kebijakan operasional berdasarkan pada misi BKM di Kota Malang dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus memajukan usaha mikro kecil guna mencapai *self-sustainability*.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara secara mendalam/*indepth interview* (Moleong, 2002:22). Penelitian dilakukan dengan wawancara pada informan yang telah ditetapkan sebagai pihak yang benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan sampai dengan permasalahan dapat terpecahkan. Jadi, peneliti berusaha mencari jawaban atas suatu persoalan sampai dengan tuntas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Moleong (2002:161) adalah setiap bahan tertulis ataupun yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang peneliti. Peneliti melakukan studi dokumen terhadap dokumen tertentu yang dimiliki oleh BKM, antara lain berupa dokumen dan laporan AD/ART BKM, laporan keuangan, peraturan dan mekanisme kerja, struktur organisasi BKM, serta berbagai laporan dan data yang terkait dengan tulisan ini.

1.5.4 Tahap Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan maksud agar data yang diperoleh mempunyai derajat kepercayaan atau validitas yang memadai. Validitas dalam penelitian sangat penting untuk menjaga agar penelitian tersebut bersifat ilmiah.

Menurut Moleong (2002:175) pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara:

- a. Ketekunan pengamatan yaitu dengan memperpanjang masa penelitian baik dengan melakukan wawancara maupun observasi ulang.
- b. Triangulasi, yaitu membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti disini adalah menggabungkan dari teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi.

1.6 Tahap Analisis Data

Analisa data menurut Moleong (2002:103) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi namun hanya ingin menggambarkan situasi (peristiwa) secara sistematis, faktual dan akurat tanpa menggunakan perhitungan statistik. Analisa data pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dari keadaan yang sedang diteliti dalam hal ini adalah strategi dan kebijakan BKM Karang Besuki dalam Penyaluran Kredit berdasarkan ketetapan P2KP Guna Mewujudkan BKM Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Yang Mandiri Berkelanjutan (*Self- Sustainability*).

1.7 Tahap Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dalam penelitian adalah tahap penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang memberikan balikan (*feed back*) pada masalah yang diteliti. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan setelah data-data yang terkumpul telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal atau pengetahuan umum ke khusus, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis implementasi strategi dan kebijakan BKM Karang Besuki dalam penyaluran kredit

2. TINJAUAN PUSTAKA



Tinjauan pustaka atau landasan teori merupakan tahap dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar dalam menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Landasan teori akan memudahkan peneliti dalam menghubungkan antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan teori yang sedang berkembang, oleh karena itu landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Strategi

Dalam organisasi yang bersaing, orang akan mencari pola yang dapat membantu mereka untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh laba tinggi. Perusahaan harus menganalisis lingkungan eksternalnya mengidentifikasi peluang dalam lingkungan tersebut, menentukan mana di antara sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki merupakan kompetensi intinya, dan memilih strategi yang cocok untuk diterapkan.

Jauch dan Glueck (1988:11) menyatakan bahwa:

“Strategi merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan”

Sedangkan menurut Hitt, dkk (1997:113) Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir (sasaran) yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk memperoleh keunggulan bersaing agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Daya bersaing strategis dan profitabilitas tinggi dicapai apabila pelanggan merupakan dasar tindakan strategis perusahaan. Tiga hal-siapa, apa dan bagaimana dipertimbangkan dalam analisis ini. Setiap perusahaan menentukan

siapa yang akan dilayani, kebutuhan apa yang akan dipenuhi dan bagaimana kebutuhan tersebut dipenuhi melalui strateginya.

Organisasi yang beroperasi dalam sektor manufaktur, jasa dan nonprofit harus memuaskan kebutuhan beberapa kelompok konsumen untuk bertahan dan mencapai daya saing strategis. Konsumen dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan perbedaan kebutuhan mereka. Dimensi umum dimana kebutuhan konsumen bervariasi mencakup gaya hidup, kelas sosial, ekonomi, karakteristik personal individual, karakteristik struktural industri dan ukuran organisasional. Dengan demikian, begitu perusahaan telah mengidentifikasi siapa yang dilayaninya maka perusahaan dapat memfokuskan perhatian pada kelompok atau segmen konsumen. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui penerapan satu dari lima strategi tingkat bisnis-keunggulan biaya, pembedaan, biaya rendah terfokus, pembedaan terfokus atau kombinasi antara keunggulan biaya dan pembedaan.

a. Jenis Strategi Tingkat Bisnis

Strategi tingkat bisnis berhubungan dengan posisi suatu perusahaan dalam industri secara relatif terhadap para pesaingnya. Apabila suatu perusahaan menempati posisi yang menguntungkan dalam hal lima kekuatan persaingan yang diperlihatkan pada Gambar 2.1, maka persaingan tersebut akan mencapai daya saing strategis dan memperoleh laba diatas rata-rata.



Gambar 2.1 Model Lima Kekuatan Persaingan

Sumber: Porter (1991:4)

Hitt, dkk (1996:121) "menyatakan bahwa terdapat empat strategi generik yaitu kepemimpinan biaya, pembedaan, biaya rendah terfokus dan pembedaan terfokus dari mana perusahaan memilih untuk menetapkan dan menggali keunggulan bersaing dalam suatu industri".

		Keunggulan Bersaing	
		Biaya	Keunikan
Target Luas Lingkup Persaingan Target Terbatas	Target Luas	Keunggulan Biaya	Pembedaan
	Target Terbatas	Biaya Rendah Terfokus	Pembedaan Terfokus

Gambar 2.2 Empat Strategi Generik

Sumber: Hitt, dkk. (1996:124)

1) Strategi Keunggulan Biaya

Saat menerapkan strategi keunggulan biaya, perusahaan menawarkan produk dengan fungsi yang dapat diterima kepada konsumen pada harga yang tetap bersaing rendah. Dengan demikian, sumber utama nilai yang ditawarkan kepada konsumen melalui penerapan strategi ini adalah biaya rendah produk tersebut. Perusahaan mencari keunggulan bersaing dengan menerapkan strategi keunggulan biaya yang menjual produk standar kepada kebanyakan konsumen tertentu dalam industri. Penerapan strategi keunggulan biaya yang berhasil mengharuskan fokus konsisten pada usaha menekan biaya secara relatif terhadap biaya pesaing. Dan seringkali perusahaan menekan biaya mereka melalui investasi dalam fasilitas berskala efisien, pengendalian ketat atas biaya dan overhead serta minimasi biaya dalam berbagai bidang termasuk pelayanan, tenaga penjualan serta penelitian dan pengembangan.

Menurut Porter (1991:40) Risiko Bersaing Strategi Keunggulan Biaya meliputi:

- Perubahan teknologi yang menghilangkan arti investasi atau pengalaman masa lalu;
- Penarikan pengalaman biaya rendah oleh pendatang baru atau pengikut dalam industri, melalui penjiplakan atau melalui kemampuan mereka untuk melakukan investasi dalam fasilitas yang modern;
- Ketidakmampuan untuk menyadari perlunya perubahan produk atau pemasaran karena perhatian dicurahkan kepada biaya;

- d) Inflasi dalam biaya yang mempersempit kemampuan perusahaan untuk mempertahankan perbedaan harga guna mengimbangi citra merek atau pendekatan diferensiasi lain dari pesaing.

2) Strategi Pembedaan atau Diferensiasi

Strategi generik yang kedua adalah mendiferensiasikan atau pembedaan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, yaitu menciptakan sesuatu yang baru yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal yang unik. Pendekatan ini bermacam-macam bentuknya : citra rancangan atau merek, teknologi, karakteristik khusus, pelayanan pelanggan, jaringan penyalur, atau dimensi-dimensi lain. Diferensiasi jika tercapai merupakan strategi yang baik untuk menghasilkan laba diatas rata-rata dalam suatu industri karena strategi ini menciptakan posisi yang aman untuk mengatasi kelima kekuatan persaingan, meskipun dengan cara yang berbeda dari strategi keunggulan biaya. Diferensiasi memberikan penyekat terhadap persaingan karena adanya loyalitas merek dari pelanggan dan mengakibatkan berkurangnya kepekaan terhadap harga. Diferensiasi juga meningkatkan margin laba yang menghindarkan kebutuhan akan posisi biaya rendah.

Menurut Porter (1991:41) diferensiasi juga melibatkan sederetan risiko antara lain:

- a) Perbedaan biaya antara pesaing biaya rendah dengan perusahaan terdiferensiasi menjadi terlalu besar akibat diferensiasi untuk mempertahankan loyalitas merek. Akibatnya, pembeli mengorbankan beberapa karakteristik, pelayanan atau citra yang dimiliki perusahaan terdiferensiasi demi penghematan biaya yang lebih besar.
- b) Kebutuhan pembeli akan faktor-faktor diferensiasi hilang. Ini dapat terjadi bila pembeli makin canggih.
- c) Imitasi memperkecil kesan adanya diferensiasi, suatu kejadian yang biasa bila industri telah matang (dewasa).

3) Strategi Fokus

Melalui keunggulan biaya maupun strategi pembedaan, suatu perusahaan berusaha untuk menggunakan kompetensi intinya yang mencakup seluruh industri untuk memperoleh keunggulan bersaing. Sebaiknya, suatu perusahaan berusaha menggunakan kompetensi intinya untuk melayani sekelompok konsumen dalam industri saat menerapkan strategi fokus. Dengan demikian, melalui penerapan

strategi fokus yang berhasil suatu perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing dalam target konsumen yang dipilihnya walaupun ia tidak memiliki keunggulan bersaing tingkat industri. Landasan strategi fokus adalah bahwa suatu perusahaan dapat melayani segmen industri yang sempit lebih efektif atau efisien daripada pesaingnya yang beroperasi dalam tingkat industri. Kesuksesan dengan strategi fokus tergantung pada kemampuan perusahaan baik untuk menemukan segmen di mana suatu kebutuhan unik yang amat terspesialisasi sehingga pesaing yang lebih besar memilih untuk tidak melayaninya atau menentukan segmen konsumen yang dilayani secara buruk oleh pesaing. Nilai dapat ditawarkan melalui dua jenis strategi fokus biaya rendah dan pembedaan terfokus.

Menurut Porter (1991:42) Risiko Bersaing Strategi Fokus antara lain meliputi:

- a) Perbedaan biaya antara pesaing berdaerah luas (*broad range competitors*) dengan perusahaan yang berfokus melebar sehingga menghilangkan keunggulan biaya dengan melayani target yang sempit atau menghilangkan differensiasi yang dicapai oleh fokus;
- b) Perbedaan dalam hal produk atau jasa yang diinginkan antara target strategis dengan pasar secara keseluruhan menyempit;
- c) Pesaing menemukan sub pasar dalam target strategi dan menyisihkan perusahaan yang menerapkan strategi fokus.

4) Strategi Biaya Rendah/ Pembedaan Terintegrasi

Dibandingkan dengan perusahaan yang mengandalkan satu strategi generik untuk kesuksesan mereka, perusahaan yang mampu menerapkan strategi biaya rendah/pembedaan terintegrasi dengan baik akan memiliki posisi yang memungkinkannya untuk melakukan adaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan, mempelajari keahlian dan teknologi baru lebih cepat, dan secara efektif mengungkit kompetensi inti mereka diantara unit usaha serta lini produk. Perusahaan yang mampu menyediakan bagi konsumennya produk yang dibedakan dengan biaya relatif rendah dapat memperoleh laba tinggi. Alasan utamanya adalah bahwa manfaat strategi terintegrasi bersifat aditif, pembedaan mengarah pada harga tinggi dan pada saat yang sama keunggulan biaya berarti rendah. Dengan demikian, strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing dengan menawarkan dua jenis tingkat nilai kepada

konsumen, yaitu fungsi yang dibedakan dan biaya yang relatif rendah. Beberapa kondisi yang saling berhubungan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing dan laba tinggi melalui penerapan strategi biaya rendah/pembedaan terintegrasi.

Menurut Hitt dkk. (1996:135) risiko persaingan strategi biaya rendah/pembedaan terintegrasi adalah perusahaan menawarkan produk yang tidak memberikan suatu nilai yang berarti baik dalam hal biaya rendah atau pembedaan.

Dari uraian empat strategi generik tersebut, UPK-BKM menggunakan strategi fokus dan strategi biaya rendah. Strategi fokus terlihat dari bentuk pelayanan jasa keuangan kepada pelaku usaha mikro (kecil) dan masyarakat miskin dengan pola penyaluran secara berkelompok, pada suatu wilayah yang relatif terbatas. Jangkauan wilayah yang terbatas dimaksudkan untuk mengurangi pembengkakan biaya evaluasi, monitoring dan penagihan kredit⁴ sebagai akibat jumlah simpanan atau kredit yang sangat kecil (mikro). Selain itu wilayah yang terbatas juga ditujukan untuk mengurangi *asymetri informasi* bagi pengelola pada calon deposannya.

Implementasi strategi fokus juga dapat dilihat dari jumlah kredit tersalur sebagian besar berjumlah mikro (sangat kecil), kredit untuk modal kerja, jangka waktu pendek, mendorong debitor untuk menabung, kredit disalurkan berbasis kelompok, membebaskan bunga atas kredit sesuai bunga pasar (guna mendorong debitor untuk berhati-hati dan membayar kredit tepat waktu), setiap kredit yang diajukan harus disertai proposal berupa analisa bisnis (walau sederhana) guna mendidik calon debitor untuk bertanggung jawab atas kreditnya.

Strategi biaya rendah dapat diidentifikasi dari efisiensi biaya operasional, biaya evaluasi, monitoring dan penagihan, serta pola penyaluran secara berkelompok. Efisiensi biaya operasional misalnya jumlah pengelola yang terbatas, penggunaan pengelola lokal yang dapat dipercaya dan mampu mengelola usaha, administrasi kantor secara sederhana tanpa mengurangi prinsip manajemen modern, prosedur pelayanan sederhana dan cepat, menggunakan gedung yang ada di kelurahan atau fasilitas umum sebagai kantor, dll.

b. Implementasi Strategi

Strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir (sasaran) yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk memperoleh keunggulan bersaing agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Strategi perusahaan bermanfaat untuk mengantisipasi tantangan dan kesempatan masa depan, dapat memberikan arah dan tujuan perusahaan di masa depan yang jelas pada semua karyawan, membuat tugas eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan kurang beresiko, dapat memonitor kejadian di dalam perusahaan, memberikan informasi pada manajemen puncak dalam merumuskan tujuan akhir, membantu pembuatan keputusan proaktif atau reaktif-progresif, membantu praktik para manajer, dan mengarahkan pada efektivitas perusahaan. Dalam menyusun strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan perusahaan yang menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan, sehingga dapat disusun dan dipilih alternatif strategi yang akhirnya diimplementasikan, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap strategi yang diimplementasikan.

Implementasi strategi seperti yang dikemukakan oleh Supriyono (1998:258) "yaitu penugasan atau penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat *corporate* maupun tingkat bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama para karyawan". Implementasi strategi juga melibatkan pengembangan kebijaksanaan fungsional, struktur organisasi, iklim yang mendukung strategi, dan membantu tercapainya tujuan-tujuan organisasi.

Implementasi berlangsung dalam suatu aliran kebiasaan. Pertama, strategi dipilih oleh manajer puncak pada tingkat *corporate* atau kantor pusat dan manajer tingkat *corporate* tersebut mengkomunikasikan strategi yang dipilih kepada para manajer tingkat unit bisnis. Selanjutnya, manajer unit bisnis memilih strategi khusus untuk unit bisnisnya dan mengimplementasikan pada divisi, departemen, dan bagian-bagian yang berada dibawahnya. Untuk perusahaan yang didesentralisasi, proses implementasi strategi adalah serupa dengan perusahaan yang mempunyai unit-unit bisnis. Pada perusahaan yang mempunyai bisnis tunggal, manajemen puncak langsung mengkomunikasikan dan

mengimplementasikan strategi pada divisi, departemen, atau bagian di bawahnya. Proses implementasi memerlukan komunikasi yang efektif dan negoisasi-negoisasi di antara semua penyusun strategi atau manajemen puncak yang berhubungan.

2.1.2 Kebijakan

Supriyono (1997:253) memberikan definisi singkat tentang kebijakan (*policy*) "adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu". Kebijakan perusahaan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran-saluran untuk berfikir, secara lebih khusus adalah pedoman untuk melaksanakan tindakan.

Kebijakan perusahaan yang diungkapkan oleh Jauch dan Glueck (1998:359) menunjukkan bagaimana tugas yang diserahkan pada organisasi dapat dilaksanakan, dan juga memberikan dasar bagi para manajer tingkat yang lebih rendah untuk mengambil keputusan, tentang penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Begitu juga yang dikemukakan oleh Salusu (2002:412) bahwa kebijakan itu berkaitan dengan pedoman pelaksanaan, metode kerja, prosedur, penentuan, formulir-formulir dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi karyawan dalam mensukseskan pencapaian sasaran organisasi sehingga kebijakan itu mengatur batas-batas apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakan, tindakan-tindakan administratif yang boleh dan tidak boleh dijalankan.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Jauch dan Glueck (1998:359), maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan perusahaan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer dalam membuat pilihan tertentu. Manajer menciptakan kebijakan yang menjadi pedoman bertindak dan ini membuat strategi yang telah ditentukan berjalan, sehingga kebijakan dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit. Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh UPK-BKM yang berkenaan dengan penyaluran kredit UPK-BKM antara lain mengenai putusan wewenang pemberian pinjaman, pengaturan pengelolaan dana dari jasa pinjaman yang

dibayarkan oleh KSM untuk Biaya Operasional (BOP), pembentukan Unit Pengelola (UP) lain selain Unit Pengelola Keuangan (UPK) jika dirasa diperlukan, serta ketetapan pemberian denda dan sanksi kepada KSM yang terlambat membayar oleh UPK-BKM.

2.1.3 Pasar Kredit Mikro

Pasar kredit pada hakekatnya sama dengan pasar dalam pengertian umum, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran berupa pemberian pinjaman dari pihak *supplier* kepada pihak *demand*. *Supplier* merupakan pihak yang memberikan pinjaman (baik berupa lembaga keuangan formal maupun informal) yang dalam hal ini adalah UPK-BKM sedangkan *demand* adalah pihak peminjam atau debitur (baik personal, kelompok maupun institusi), yaitu para pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang tergabung dalam KSM-KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Banyak terdapat variasi bentuk pasar, namun dua bentuk pasar yang paling ekstrim adalah pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Ciri pasar monopoli adalah hanya terdapat satu *supplier* (satu *supplier* dominan) dan banyak pembeli, sehingga produsen sebagai *price maker*. Penguasaan pasar oleh satu *supplier* dapat terjadi karena penguasaan input, regulasi pemerintah atau faktor lain yang bersifat alamiah, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna terdapat dua atau lebih *supplier* yang saling bersaing, tersedia informasi yang banyak dan mudah diperolehnya, serta mudahnya keluar masuk bagi pelakunya.

Pasar persaingan memiliki ciri banyak pembeli dan penjual, sehingga tidak ada salah satu pihak atau individual dapat mempengaruhi pasar. Hal ini menyebabkan baik *supplier* maupun *demand* sama-sama sebagai *price taker*. Kondisi tersebut hanya menyebabkan *supplier* hanya akan memperoleh keuntungan normal dan hanya menjual komoditi yang standar. Selain itu, tidak ada halangan masuk dan keluar bagi *supplier* baru.

Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1994 memberi batasan mengenai karakteristik Usaha Kecil sebagai berikut : a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha, b). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah/tahun, c). Milik warga negara Indonesia, d). Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar, bentuk usaha orang-per orang, Badan usaha yang tidak berBadan hukum, termasuk koperasi. Berdasarkan karakteristik diatas agar lebih *bankable* maka pola penyaluran kredit untuk usaha ini dilakukan secara individual dan kredit yang diperlukan selain untuk modal kerja juga untuk investasi, sehingga memungkinkan terjadinya pengembangan dan perluasan usaha.

Menurut laporan penelitian Bank Indonesia (2003:34) karakteristik usaha mikro adalah usaha ini lebih banyak beroperasi pada kegiatan informal, tidak ada kejelasan mengenai status usaha, tidak ada pemisahan yang tegas antara kegiatan-kegiatan keuangan untuk pembiayaan usaha, memiliki tenaga kerja jumlahnya tidak banyak berkisar 10-15 orang saja, dan dalam memasarkan hasil produksinya hanya beroperasi pada pasar domestik dan lokal saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik usaha mikro dapat dilihat dari lingkup usahanya, tenaga kerja yang dimiliki dan juga permodalan yang dibutuhkan. Berdasarkan karakteristik usaha mikro, maka kebutuhan kredit untuk jenis ini adalah untuk modal kerja yang berjangka pendek dengan pola penyaluran kredit secara kelompok.

Karakteristik kredit sebagai bentuk transaksi dua pihak dengan janji mengembalikan pinjaman pada waktu yang akan datang, mengandung resiko akibat asimetri informasi terutama dari pihak peminjam. Informasi asimetri merujuk pada kondisi transaksi yang tidak seimbang akibat informasi yang tidak seimbang yang diketahui oleh masing-masing pihak dalam transaksi (Mc Aechern, 2001:281).

Pihak *supplier* dalam pasar kredit mikro adalah semua lembaga keuangan, pemberi kredit mikro pada sektor UMK. Hanya lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank yang berkecimpung dalam usaha ini. Masing-masing lembaga keuangan mempunyai karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda yaitu :

Tabel 2.1 Karakteristik Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank

Bank	Non Bank
Menawarkan tingkat suku bunga yang relatif rendah.	Tingkat suku bunga yang tinggi.
Minim akses dan informasi tentang nasabah atau debitur.	Akses dan informasi yang lebih banyak tentang debitur.
Perlu waktu dalam proses pencairan pinjaman.	Proses pencairan kredit yang relatif cepat.
Sangat memperhatikan aspek legalitas.	Kurang memperhatikan aspek legalitas.

Sumber: Sungkowo, dkk, 2006

Perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan dalam besarnya biaya pinjaman yang ditanggung oleh nasabah atau debitur. Masing-masing lembaga keuangan yang ada dalam pasar kredit mikro ini akan bersaing satu sama lain. Kenyataannya, nasabah lebih memilih lembaga keuangan non bank dengan pertimbangan kemudahan proses dan relatif cepatnya waktu pencairan kredit atau pinjaman yang diinginkan meski harus menanggung biaya pinjaman yang lebih tinggi, sementara lembaga keuangan bank (perbankan) sendiri mengalami hambatan dalam menangani sektor UMK ini. BI dan UGM (2003:66) mengemukakan hambatan tersebut antara lain yaitu :

- a. Perbankan tidak memiliki informasi yang dapat diandalkan (*reliable*) tentang calon debiturnya.
- b. Kesulitan dalam menjalankan kontak (sebagai akibat dari acuan kerangka kerja yang kurang memadai dan sistem peradilan yang tidak efisien).
- c. Kurang instrumen yang tepat untuk *managing risk*.
- d. Pengawasan dan persyaratan kecukupan modal atau jaminan.

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan penyerapan kredit antara lembaga keuangan Bank dan Non Bank adalah akses dan informasi tentang calon debitur. Informasi tersebut dapat berupa apa yang diinginkan oleh debitur, kemudahan-kemudahan yang diinginkan tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit dan kedekatan lembaga keuangan dengan debitur.

Ketidakseimbangan informasi dalam transaksi memiliki dua dimensi yaitu:

1) Karakteristik tersembunyi dari suatu komoditi yang dimiliki oleh suatu pihak dan pihak lain yang berkepentingan tidak mengetahuinya, dan 2) Tindakan tersembunyi, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak untuk memaksimalkan kepuasaan atau kekayaannya dengan merugikan pihak lain didalam situasi dimana mereka tidak menanggung konsekuensinya sebagai akibat adanya ketidakpastian, perjanjian-perjanjian yang terbatas dan tidak lengkap sebagai akibat keterbatasan informasi (Akerloff;1970; Stiglitz;1986; Wilson;1987).

Pada pasar kredit, karakteristik tersembunyi muncul dari sisi peminjam dalam bentuk kepemilikan informasi yang lebih sempurna mengenai kelayakan usaha, kemampuan mengembalikan kredit atau dari sisi nilai atau legalitas aset. Sementara tindakan tersembunyi muncul ketika pihak terpinjam tidak dapat mengontrol secara tepat tindakan peminjam dalam menggunakan kredit atau tindakan lain yang dapat mengurangi kemampuan mengembalikan kredit serta merawat agunan secara wajar.

Pada tataran ekonomi konvensional pasar diasumsikan bersaing secara sempurna dan informasi murah, serta mudah diperoleh dari pihak yang terlibat. Asumsi ini berlawanan dengan kenyataan bahwa manusia cenderung untuk mementingkan diri sendiri (oportunistik), memiliki rasionalitas terbatas dan informasi yang terbatas (asimetri informasi).

Kondisi tersebut, menurut Floro dan Yatopoulos (1991) menyebabkan pasar kredit di Negara berkembang ditransaksikan dalam pasar yang tidak sempurna, yang menyebabkan : 1) munculnya pasar kredit yang tersegmentasi (*segmented credit markets*) yaitu kredit dari lembaga keuangan informal; dan 2) *collateral arrangement* dan berbagai jenis perjanjian retriaktif lainnya.

Pasar kredit dari lembaga keuangan formal (sebagaimana dikutip Floro dan Yatopoulos) cenderung memberikan kredit pada nasabah besar daripada kecil, di perkotaan daripada di pedesaan dan kepada nasabah industri atau perdagangan daripada pada pertanian. Hal ini didukung dengan tata aturan (*aransemen*) atas jaminan (*collateral*) atau *improved social infrastructure* atau upaya pembentukan jaringan informasi antar bank (*information sharing networks*). Faktor tersebut

menyebabkan ada ruang kosong yang ditinggalkan oleh pasar kredit formal dan dapat dimanfaatkan oleh kredit informal.

Pasar kredit formal merujuk pada mekanisme kerja, bentuk dan tata aturan yang baku dibawah kontrol bank sentral dengan mendasarkan diri pada regulasi perbankan. Aktivitas lembaga keuangan formal secara tipikal kredit dan deposito dengan jumlah besar, menggunakan agunan pasti, jangka waktu panjang dan menggunakan legal banking. Sedangkan pasar kredit informal memberikan fasilitas kredit dan deposito dengan prosedur yang sederhana dan dikelola tidak mendasarkan diri pada regulasi perbankan, Adams (dalam Soegiarto, 1994).

Adanya hubungan personal dan interaksi secara terus menerus membuat pelaku kredit informal memiliki informasi tentang karakteristik nasabah dan dapat mengawasi penggunaan kredit sehingga dapat melakukan seleksi pada nasabah yang melakukan resiko kegagalan yang rendah dan meningkatkan peminjam yang berisiko tinggi pada lembaga keuangan formal (Stiglitz dan Weiss, 1981; Braverman dan Gausch, 1992).

2.1.4 Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensional mencakup politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Untuk mengatasi persoalan yang demikian maka pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kearah pengokohan kelembagaan masyarakat. Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi politik, sosial, dan ekonomi serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatannya maupun menyuarkan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan intensif oleh fasilitator kelurahan di tiap kelompok peserta Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

P2KP merupakan proyek pemerintah yang secara substansi berupaya memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat sehingga dapat dibangun gerakan bersama dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan di wilayah bersangkutan.

P2KP merupakan kelanjutan dari Proyek IDT dan JPS dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dibandingkan dengan IDT dan JPS, beberapa penyempurnaan telah dilakukan terhadap P2KP terutama dalam hal pengelolaan dana. Kalau sebelumnya pengelolaan dana dilakukan oleh aparat desa/kelurahan, maka pengelolaan dana P2KP dilakukan sepenuhnya oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk di setiap desa/kelurahan. Peran aparat desa/kelurahan hanya terbatas pada tugas-tugas *supporting*, baik dalam membantu sosialisasi, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), maupun dalam tugas-tugas administratif lainnya.

Proyek P2KP yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengembangan usaha produktif ini telah diluncurkan oleh pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian Pemukiman dan pengembangan Wilayah sejak tahun 2000. Pendanaannya bersumber dari pinjaman lunak Bank Dunia. Kini dana yang disalurkan melalui proyek P2KP ini telah menjangkau hampir seluruh desa di pulau Jawa, Bali dan beberapa daerah lainnya, dimana setiap BKM mendapat bantuan antara Rp.250 juta hingga Rp.750 juta.

BKM adalah kepanjangan dari Badan Keswadayaan Masyarakat yang merupakan istilah umum untuk suatu institusi atau lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu organisasi masyarakat warga ditingkat kelurahan. Kedudukan serta hubungan BKM dengan kelurahan dan organisasi masyarakat formal lainnya ditingkat kelurahan tidak bersifat struktural formal, melainkan hubungan yang bersifat koordinatif, fungsional dan komplementer atau saling melengkapi serta mendukung satu sama lain. Perangkat kelurahan sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal diharapkan dapat

menempatkan perannya sebagai *enable* dan fasilitator untuk mendukung prakarsa masyarakat, khususnya dan pembergunaan masyarakat kelurahan pada umumnya.

UPK adalah salah satu gugus tugas BKM yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan melaksanakan sistem pembukuan termasuk di dalamnya membuat perencanaan keuangan secara periodik melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan kepada BKM.

Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan unit-unit pengelola lainnya merupakan gugus tugas/organ teknis BKM yang melaksanakan kebijakan dan keputusan BKM serta bertanggungjawab langsung kepada BKM. Pengelola UPK (manajer dan staf lainnya) diangkat serta diberhentikan oleh BKM melalui mekanisme Rapat Anggota BKM. Oleh karena itu, secara struktural, pengelola UPK bertanggungjawab langsung kepada BKM. Sebagai unsur pengelola sumber daya, khususnya keuangan, UPK bertanggungjawab kepada BKM dalam hal pengelolaan keuangan yang disalurkan lewat BKM ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan penggulirannya.

2.1.5 Lembaga Keuangan Mikro

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) (dalam Wijono, 2005) "lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil".

Menurut Bank Indonesia (dalam Wijono, 2005) LKM dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan kredit union. Berdasarkan pembagian ini, maka UPK-BKM dapat dikategorikan sebagai LKM yang berwujud non bank yang tergabung dibawah LSM. Berdasarkan perkembangan yang terjadi ini, maka keberadaan UPK - BKM sangat membantu

para pengusaha mikro yang masih kebanyakan sulit untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan informal lainnya.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terjadi seiring dengan perkembangan UKM dan juga tidak terlepas dari karakteristik LKM yang memberikan kemudahan kepada pelaku UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Adapun karakteristik dari LKM menurut Primahendra (dalam Sutopo, 2005) meliputi: 1) terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutama simpanan dan pinjaman; 2) diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah; dan 3) menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana.

Berdasarkan karakteristik LKM tersebut maka beberapa prinsip yang harus menjadi acuan agar LKM dapat menjalankan fungsi secara berkelanjutan adalah : 1) *Offer services that fit preferences of low-income entrepreneur*; 2) *streamline operations to reduce costs*; 3) *motivate clients to repay loans*; 4) *charge full-cost interest and fund*. (AMIR Programme dalam www.gdrc.org). Beberapa prinsip tersebut sejalan dengan praktek Grameen Bank, yaitu : *small loans, primarily women, group of five, weekly payment, lower poor, required saving, interest charged, banking business and high commitment to training*, (Mayfield,1998).

2.1.6 Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan/bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan (*faith*).

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian diatas maka kredit dapat diartikan sebagai kegiatan penyediaan atas sejumlah uang atau kegiatan pinjam-meminjam dan

kemudian diserahkan kepada pihak lain, dimana pihak peminjam merupakan kewajiban melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu dan kemudian ditambah atas sejumlah bunga atas penyerahan sejumlah uang tersebut dengan dasar kepercayaan.

Seorang kreditur dalam memberikan kreditnya harus melakukan penilaian terlebih dahulu kepada calon peminjamnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur dan prinsip-prinsip kredit didalamnya.

Menurut Tjoekam (1999:02) unsur kredit terdiri dari:

- a. Waktu
- b. Kepercayaan
- c. Penyerahan
- d. Risiko
- e. Persetujuan atau perjanjian.

Sedangkan Kasmir (2004:103-104) menyebutkan unsur-unsur dalam pemberian kredit yaitu:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka Waktu
- d. Resiko
- e. Balas Jasa

Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh kreditur sebelum memberikan pinjamannya, yaitu unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa atas pinjaman dana yang telah diberikan.

Kredit yang diberikan oleh lembaga informal kepada debitur umumnya berskala kecil dan diperuntukkan bagi pengusaha yang berpenghasilan rendah dan sulit mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Kredit ini biasanya disebut dengan kredit mikro. *The World Summit On Micro Credit* (dalam Osira, 2005:27) menyatakan:

“kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya”.

Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun

kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun.

Kredit mikro ditandai oleh: 1) Tidak diberi subsidi dan tidak berdasar aturan formal; 2) Adanya kemudahan dalam proses peminjaman uang; 3) ketersediaan pinjaman dalam ukuran sangat kecil dan berjangka pendek; 4) hampir tidak ada administrasi dan rendahnya biaya informasi; 5) adanya sedikit agunan atau bahkan tidak ada; 6) fleksibel dan tingkat bunga variatif (dari bunga yang sangat tinggi – bunga yang rendah); 7) Transaksi yang sangat fleksibel dan pembayaran kredit sesuai dengan kemampuan individu, (Srinivas, 2005).

2.1.7 *Self-Sustainable*

a) Pengertian *Self-Sustainable*

Definisi mengenai *sustainability* dan *self-sustainability* ² sukar untuk dipahami, karena arti luas yang dipunyainya, untuk keuangan, ekonomi, kelembagaan dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya jika digunakan pada lembaga keuangan, maka *self-sustainability* dapat dilihat dari segi manajemen keuangannya, dan dapat diartikan sebagai upaya atau kemampuan untuk terus bertahan dengan kemampuan sendiri baik dibidang usaha sebagai pengusaha (pengelola) maupun sebagai perusahaan (lembaga kredit) untuk tetap memenuhi kewajibannya dan terus berkembang.

Menurut Murdoch dan Hayley :

Definisi dari *Self-Sustainability* adalah terbatas pada Lembaga Keuangan Mikro yang dapat mengembalikan pinjaman dari kredit awal tanpa membebankan biaya administrasi pada biaya operasional pada saat pencairan”.

Jadi dengan kata lain pengertian dari *sustainable* adalah kemampuan lembaga keuangan mikro untuk menjaga keberlangsungan pengembalian kredit yang diberikan, sehingga dapat terus berkembang dan terhindarkan dari kebangkrutan.

b) Prinsip-prinsip *Self-Sustainable*

Prinsip-prinsip untuk *sustainable* (keberlangsungan) operasional lembaga keuangan mikro berdasarkan *AMIR Programme-Sustainable Microfinance Initiative* antara lain meliputi:

- 1) Menawarkan jasa-jasa dengan pilihan yang sesuai untuk pengusaha berpenghasilan rendah, terdiri dari ;
 - a) Memberikan pinjaman jangka pendek;
 - b) Memberikan pinjaman dalam jumlah kecil;
 - c) Memberikan pinjaman ulang;
 - d) Penggunaannya bersifat bebas;
 - e) Menjaga hubungan baik dengan nasabah.
- 2) Memperlancar kegiatan usaha dengan biaya rendah
 - a) Memperlancar kegiatan usaha;
 - b) Proses peminjamannya lebih mudah;
 - c) Keputusan pemberian kredit berdasarkan persetujuan pimpinan setempat;
 - d) Biaya administrasi/jasa murah;
 - e) Pengurus dipilih dari masyarakat sekitar.
- 3) Memotivasi debitur untuk membayar kembali pinjaman
 - a) Tidak membutuhkan jaminan formal;
 - b) Menggunakan pendekatan kelompok dengan tanggung jawab bersama untuk memotivasi pengembalian pinjaman;
 - c) Menggunakan insentif atau perangsang untuk pengembalian pinjaman dengan cepat;
 - d) Membangun *image* masyarakat terhadap keseriusan tentang pinjaman kelompok.
- 4) Harga penuh- biaya bunga rata-rata dan biaya-biaya lain
 - a) pengembalian biaya-biaya pinjaman. Pinjaman dalam jumlah kecil dan besar angsuran serta jangka waktu pengembalian ditentukan berdasarkan kemampuan debitur meskipun dengan rata-rata bunga lebih tinggi dari pada bank komersil.
 - b) Pembayaran kembali yang diharapkan. Pengusaha dengan penghasilan rendah menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk membayar bunga rata-rata lebih tinggi daripada bank-bank komersial untuk jasa-jasa yang sesuai dengan kebutuhannya.

c) Indikator-indikator keberlangsungan lembaga keuangan mikro

Indikator-indikator keberlangsungan lembaga keuangan mikro berdasarkan *AMIR Programme-Sustainable Microfinance Initiative* antara lain meliputi:

- 1) Keefektifan Biaya
 - a) Ukuran rata-rata pinjaman
 - b) Biaya total per pinjaman
 - c) Jumlah portfolio per pokok kredit

- d) Jumlah pinjaman per pokok kredit
 - e) Persentase pinjaman sesuai dengan yang harus dibayarkan
 - f) Dana dicairkan sebagai bagian dari portofolio
 - g) Rata-rata pengembalian
- 2) Pertumbuhan (persentase perubahan)
- a) Portofolio pinjaman
 - b) Tabungan awal
 - c) Biaya-biaya operasi
 - d) Keseimbangan pendapatan
 - e) Pendapatan bunga
 - f) Ukuran rata-rata pinjaman
 - g) Biaya total per pinjaman

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi Sungkowo, dkk (2003) di UPK Kelurahan Badean dan Dabasah Bondowoso, menyebutkan implementasi prinsip ekonomi dan social adalah dengan mengenakan bunga atas kredit sebesar 1,5% dengan komposisi alikasi : a) 0,75% pemupukan modal kerja; b) 0,75 untuk dana bergulir (30% cadangan; 30% social & pendidikan; 30% sarana; 10% lain lain). Kredit diberikan kepada usaha mikro (perintisan dan pengembangan) dengan prosedur sederhana, cepat, jumlah mikro, pembayaran mingguan, transparan dan efisien.

Kinerja 2 UPK tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan dana hibah dari bank Dunia (modal awal) sebesar Rp. 180 juta dan Rp. 240 juta tahun 2000 berkembang berkembang menjadi Rp. 498,76 juta dan Rp. 654,13 juta (tumbuh 271%) akhir tahun 2002. Jumlah masyarakat miskin dan UMK yang terlayani sebanyak 570 dan 648 anggota. Bagian bunga kredit untuk kepentingan social diwujudkan dengan pemberian beasiswa murid SD, santunan bagi warga miskin, bantuan untuk lembaga pendidikan, perbaikan rumah warga dan jalan kampung dan sebagainya.

Kinerja UPK di Bondowoso tersebut menunjukkan bahwa 1) LKM model UPK dapat mencapai misi social melalui pengelolaan usaha menurut prinsip ekonomi, 2) kehadirannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro, 3) masyarakat miskin dan usaha mikro sesungguhnya memiliki kemampuan untuk menghimpun dan memobilisasi dana untuk kemajuan bersama. Dengan kata

lain ketika proyek P2KP telah selesai, maka UPK menjadi entitas bisnis terbentuk LKM yang independent milik masyarakat.

Studi Palupi (2005), tentang perilaku permintaan kredit pada lembaga keuangan formal. Hasil dari penelitian ini adalah: a) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan kredit adalah bidang usaha pada pertanian, tingkat pendidikan (SD), jenis kelamin wanita, tingkat bunga, biaya transaksi, dan nilai jaminan; b) Variabel tingkat suku bunga dan biaya transaksi menyimpang dari teori. Penyimpangan pada tingkat suku bunga dan biaya transaksi diduga dan disebabkan oleh keterbatasan jumlah lembaga keuangan yang menawarkan kredit mikro-kecil hingga pedesaan (sebagaimana lokasi penelitian), biaya bunga kredit formal yang lebih rendah dari kredit informal dan biaya transaksi yang disadari sebagai bagian dari kredit; c) Variabel jaminan sesuai dengan teori, yaitu besarnya nilai kolateral berpengaruh positif terhadap kredit yang dapat diakses oleh pelaku usaha mikro. Temuan lapangan menunjukkan telah terjadi modifikasi aspek legalitas dan kelayakan kolateral yang bukan saja pada besaran nilai ekonomis semata, tetapi juga aspek lainnya terutama pada koperasi dan BPR, misalnya surat nikah, kartu keluarga, KTP, dll.



BAB 4. KESIMPULAN

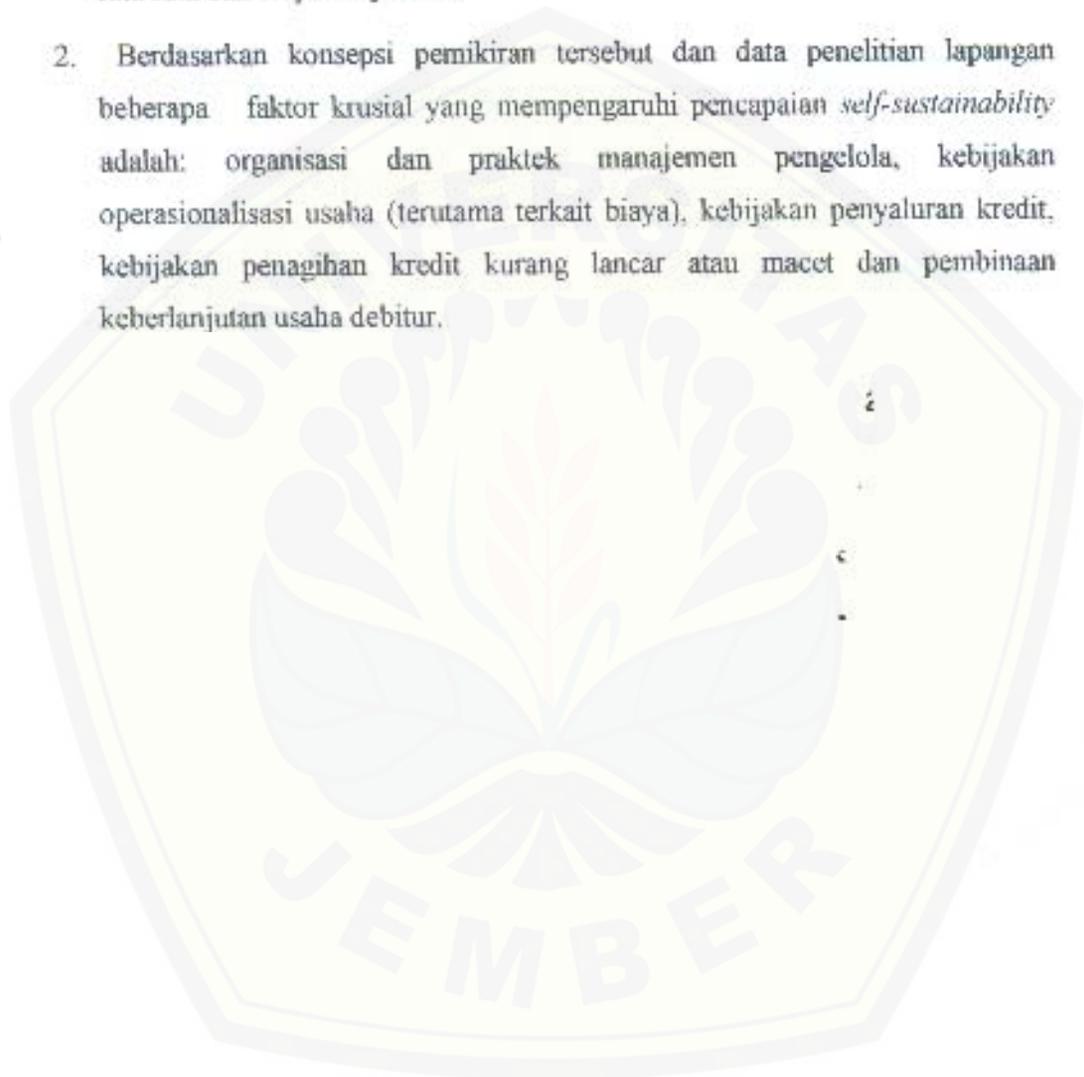
P2KP merupakan proyek pemerintah yang secara substansi berupaya memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat sehingga dapat dibangun gerakan bersama dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan di wilayah bersangkutan. Proyek P2KP ini telah diluncurkan oleh pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian Pemukiman dan Pengembangan Wilayah sejak tahun 2000, dan pendanaannya bersumber dari pinjaman lunak Bank Dunia. Dalam penggunaan dananya, P2KP melalui UPK yang merupakan gugus tugas dari BKM berfungsi untuk mengelola keuangan dan melaksanakan sistem pembukuan termasuk di dalamnya membuat perencanaan keuangan secara periodik melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan kepada BKM.

Sebagai hasil akhir dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan mengenai implementasi strategi dan Kebijakan P2KP oleh BKM dalam penyaluran kredit guna mencapai *self-sustainable*, sebagai berikut :

1. Strategi yang dilaksanakan oleh BKM Karang besuki adalah sesuai dengan Prinsip-prinsip untuk mencapai *self-sustainable* lembaga keuangan mikro menurut *AMIR Programme-Sustainable Microfinance Initiative* antara lain meliputi:
 - a. **Menawarkan jasa-jasa dengan pilihan yang sesuai untuk pengusaha berpenghasilan rendah (masyarakat miskin)**, misalnya: pinjaman jangka pendek, pinjaman dalam jumlah kecil, memberikan pinjaman ulang, penggunaannya bersifat bebas, menjaga hubungan baik dengan nasabah.
 - b. **Memperlancar kegiatan usaha dengan biaya rendah**: memperlancar kegiatan usaha debitur, proses peminjamannya lebih mudah, keputusan pemberian kredit berdasarkan persetujuan pimpinan setempat, biaya administrasi/jasa murah, pengurus dipilih dari masyarakat sekitar.

c. *Memotivasi debitur untuk membayar kembali pinjaman*: tidak membutuhkan jaminan formal, pendekatan kelompok, menggunakan insentif untuk pengembalian pinjaman dengan cepat, membangun *image* masyarakat terhadap keseriusan tentang pinjaman kelompok, harga penuh- biaya bunga rata-rata dan biaya-biaya lain.

2. Berdasarkan konsepsi pemikiran tersebut dan data penelitian lapangan beberapa faktor krusial yang mempengaruhi pencapaian *self-sustainability* adalah: organisasi dan praktek manajemen pengelola, kebijakan operasionalisasi usaha (terutama terkait biaya), kebijakan penyaluran kredit, kebijakan penagihan kredit kurang lancar atau macet dan pembinaan keberlanjutan usaha debitur.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Achmad. 1984. *Bank Rekan Terpercaya dalam Usaha Anda*. Jakarta: Balai Aksara
- Bambang, J.S. 1997. *Micro Banking untuk Micro Entrepreneurs*, Dalam Diskusi Ahli : Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Financial Usaha Kecil di Indonesia. Editor : Erna Ermawati Chotim dan Juni Thamrin. Bandung : AKATIGA
- Brata, A. Gunadi. 2003. *Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi*. [www.ekonomirakyat.org/artikel/Reformasi Kebijakan](http://www.ekonomirakyat.org/artikel/Reformasi%20Kebijakan). [8 November 2003]
- Chotim et al. 1994. *Kredit Oleh Rakyat: Dari Mekanisme Arisan Hingga BPR*. Bandung : Akatiga
- Firdaus Racmad dan M. Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Floro, Sragario L. And Yotopoulos, Pan A. 1991. *Informal Credit Markets and The New Institutional Economics, The case Of Philippine Agriculture*. San Fransisco : Westview Press
- Glueck, W. F. 1996. *Manajemen strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Gunardi, Harry S., dkk. 1994. *Kredit Untuk Rakyat: Dari Mekanisme Arisan Hingga BPR*. Bandung: Akatiga
- Hitt, Michael. A dan Ireland, R. Duane. 1996. *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi*. Jakarta : Erlangga
- Ismawan, Bambang dan Budiantoro, Setyo. 2005. *Kompilasi data Gema PKM-Oktober 2004, Mapping Microfinance In Indonesia*. Dalam Jurnal Ekonomi Rakyat.
- Jufri, Al Asri. 2005. *Penyebab Kegagalan Pendekatan Kelompok dalam Pembiayaan Mikro: Studi Kasus P2KP*. Dalam Manajemen Usahawan Indonesia-Hambatan Pendekatan Kelompok dalam Pembiayaan Mikro. No. 02/tahun XXXVI Pebruari 2005.
- Kasmir, 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.
- McEachern. 2001. *Ekonomi Mikro*. Terjemahan, Sigit Triandan. Jakarta : Salemba Empat

- Nawawi. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press
- Nugroho, Heru. 1997. *Kredit Bagi Usaha kecil, Pelayanan Yang Mereka Butuhkan, Dalam Diskusi Ahli : Pemberdayaan Dan Replikasi Aspek Finansial*
- Osira, Yessillia. 2005. *Menagani Kemiskinan Perkotaan Melalui Pengembangan Kelembagaan Mikro Kredit Berbasis Komunitas: Studi di Kelurahan Pasar Minggu*. Dalam *Manajemen Usahawan Indonesia-Mikro Kredit Berbasis Komunitas*. No. 1/XXXVI. Januari 2005
- Porter, Michael E. 1991. *Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*. Jakarta : Erlangga
- Usman, Husaini dan Purnomo S. A. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UNEJ
- Soegiarto. 1994. *Debitur Potensial di Pedesaan Jawa, Kasus Penerimaan Masyarakat Terhadap Aktivitas Pelepas Uang*. Dalam *Prisma* No.09, 1994, Jakarta
- Srinivas, Hari. 2005. *The Identification Of Informal Credit Supplier*. www.gdrc.org/icm/identi.html, download 17 Juni 2005
- Sutopo, Wahyudi. 2005. *Hubungan antara Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Usaha Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan*. Dalam *Manajemen Usahawan Indonesia-Mikro Kredit Berbasis Komunitas*. No. 1/XXXVI. Januari 2005
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: IKAPI
- Sungkowo, Dwi, M. Syarifuddin dan A. Toha. 2006. *Perilaku Permintaan Kredit pada Usaha Mikro-Kecil Dan Strategi Bersaing Lembaga Keuangan di Kabupaten Jember*. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian, Universitas Jember, tidak diterbitkan
- Supriyono, R. A. 1998. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogya
- Tjoekam, Moh. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komerstial (Konsep, Teknik, Dan Kasus)*. Yogyakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Widodo, Tri. 2003. *Dampak Pola Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Kinerja Bank dan nasabah, Kerjasama Litbang Bank Indonesia – Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM*. Jakarta : Bank Indonesia

-----, *Pedoman Umum Bersama Membangun Kemandirian, dalam Pengembangan Masyarakat, serta Perumahan dan Permukiman Yang Berkelanjutan*. Jakarta Pusat : P2KP Direktorat Jenderal Perumahan Dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana.

Wijono, Wiloejo, Wirjo. 2005. *Pemberdayaan Lembaga keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Dalam kajian Ekonomi Dan keuangan, Edisi Khusus November 2005*, Jakarta

-----, *Buku Pegangan Pelaku : Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)*. Jakarta Pusat : P2KP Direktorat Jenderal Perumahan Dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana.

-----, 2003. *Laporan Penelitian Bank Indonesia*. Jakarta: bank Indonesia

<http://www.apkasi.or.id/modules>.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Deskripsi Perusahaan

- 1.1 Sejarah lahirnya P2KP
- 1.2 Visi-misi P2KP
- 1.3 P2KP Tahap I Kota Malang
- 1.4 BKM Karangbesuki
- 1.5 Struktur Organisasi BKM Karangbesuki
- 1.6 Pembagian Tugas Pengurus BKM Karangbesuki

II. Deskripsi permasalahan

- 2.1 Strategi dalam penyaluran kredit
- 2.2 Kegiatan dalam penyaluran kredit
- 2.3 Implementasi dalam penyaluran kredit BKM Karangbesuki
- 2.4 Kebijakan dalam penyaluran kredit

P2KP

BKM KARANGBESUKI

FORMAT C

Propinsi : Jawa Timur
Kecamatan : Sukun
Kota/Kabupaten : Malang
Kelurahan/Desa : Karangbesuki

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan warga yang diselenggarakan pada hari..... tanggal..... Di Kelurahan dimaksud, ditetapkan bahwa nama-nama senagai berikut (terlampir) adalah warga yang menjadi Anggota, Ketua, Bendahara, dan Tenaga Pembantu dalam KSM-KSM yang memebentuk untuk kepentingan pelaksanaan P2KP.

Tanggal

Mengetahui,

1. KETUA KSM

2. KETUA RT

3. KETUA RW.....

4. Wakil Pengurus BKM

RW....

P2KP

DAFTAR NAMA DAN KEANGGOTAAN KSM

Lampiran Format C

Propinsi : JAWA TIMUR
 Kecamatan : SUKUN
 Kota/Kabupaten : MALANG
 Kelurahan/Desa : KARANGBESUKI
 RW :

Nama KSM	No.	Nama Anggota	Jabatan/ Posisi	Alamat	Tanda tangan
←			Ketua		
			Bendahara		

Tanggal.....

Mengetahui,

 KETUA RW.....

 KETUA RT.....

KELAYAKAN PENGGUNA DANA P2KP
KELURAHAN KARANGBESUKI KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG

Nama KSM : _____ Lokasi usaha : _____
 Nam pengguna dana : _____ Siklus Usaha : ①= Hari ②= Minggu ③= Bulan *)
 Jenis Usaha : _____

A. Kekayaan (Asset) Yang Dimiliki yang Terkait dengan Usaha :

1. _____ Senilai Rp _____
2. _____ Senilai Rp _____
3. _____ Senilai Rp _____
4. _____ Senilai Rp _____
5. _____ Senilai Rp _____

B. Modal (uang tunai) Usaha yang dimiliki : Rp _____

C. Penghasilan/Pendapatan dari usaha (rata-rata) per ①= Hari ②= Minggu ③= Bulan *) Rp _____

D. Biaya/Pengeluaran Usaha (rata-rata) per ①= Hari ②= Minggu ③= Bulan *) Rp _____

E. Penghasilan Bersih Rata-rata ①= Hari ②= Minggu ③= Bulan *) Rp _____

F. Kebutuhan Modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha : Rp _____

G. Rencana Penggunaan Dana Pinjaman :

1. _____ Sebesar Rp _____
 2. _____ Sebesar Rp _____
 3. _____ Sebesar Rp _____
 4. _____ Sebesar Rp _____
- Jumlah Rp _____

Kriteria Kelayakan (diisi oleh pengurus) :

A. Kondisi : = Baik = Cukup = Tidak Baik *)

B. Usaha :

1. Aset yang dimiliki : = Baik = Cukup = Kurang *)

2. Modal usaha yang dimiliki : = Baik = Cukup = Kurang *)

3. Pendapatan yang diterima : = Besar = Cukup = Kurang *)

4. Pengeluaran Usaha : = Baik = Cukup = Kurang *)

5. Lama Usaha : = Satu Tahun = Dua Tahun = Lebih dari Tiga Tahun *)

6. Tenaga Kerja : = 1-3 orang = 4-7 orang = Lebih dari 7 orang *)

7. Sumber Bahan Baku : = Satu Daerah = Luar Daerah = Luar Pulau *)

8. Cara Memperoleh Bhn Baku : = Mudah = Sulit = Sangat Sulit *)

C. Rekomendasi :

D. Keputusan Tim Evaluasi : = Layak = Kurang Layak = Tidak Layak *)

E. Keputusan Borum BKM : _____

**DAFTAR ALOKASI DANA PINJAMAN
DARI KSM KEPADA ANGGOTANYA**

Nama KSM :
Nama Ketua :
Alamat :

NO	Nama Penerima	Jumlah Dana	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			
	Jumlah		

Malang, 200...

Ketua KSM

()

BKM	SATUAN WILAYAH KERJA IX JAWA TIMUR	LAMPIRAN FORMAT G-2 DAFTAR ANGGOTA KSM
------------	---	--

Nama KSM :
 Kelurahan / Desa :
 Kecamatan :
 Kota/Kabupaten :

NO	NAMA ANGGOTA	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
1.			
2.		2	
3.			
4.			
5.		c	

Malang,200....

Ketua KSM

(.....)

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

Yang bertandatangan Di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama KSM :

Alamat :

Pada hari..... tanggal.....bulan..... tahunatas nama KSM..... Meminjam uang pada BKM Karangbesuki Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kodya Malang sejumlah Rp. ()

Sehubungan dengan itu kami, KSM..... berjanji memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Membayar kembali angsuran sebanyak 12 (Dua Belas) kali, masing-masing sebesar:

Pokok : Rp.....

Bunga : Rp.....

Angsuran : Rp.....

2. Pembayaran pertama akan dimulai pada tanggal..... bulan tahun..... dan setiap bulan berikutnya pada tanggal yang sama sampai lunas.

3. Memenuhi semua Pedoman Tata Laksana Peminjaman Dana dari BKM Karang Besuki Tanggal..... (terlampir)

4. Memberi jaminan tanggung renteng seluruh anggota KSM sebagaimana pernyataan tanggung renteng terlampir.

5. Menandatangani surat pernyataan bersama dan butir-butir kesepakatan antar anggota KSM

Demikian perjanjian ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kesadaran bersama tanpa unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Malang,..... 200....

Yang membuat perjanjian

Ketua KSM

()

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Bismillahirrohmanirrohiem

Yang bertandatangan dibawah ini, Saya anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
beralamat Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang menyatakan
bahwa:

1. Saya sanggup mentaati seluruh kesepakatan yang telah dibuat oleh kelompok yang berkenaan dengan pelaksanaan pengembalian dana Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah saya terima.
2. *Apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian dana pinjaman tersebut, saya siap menyerahkan barang-barang apa saja yang saya miliki, yang atas persetujuan seluruh anggota KSM yang nilainya dianggap sebanding dengan besarnya dana pinjaman yang tidak dapat saya kembalikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 200...

Ketua KSM

Bendahara KSM

(Nama)

(Nama)

Anggota KSM

1.
2.
3.

BUTIR-BUTIR KESEPAKATAN

ANGGOTA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM).....

BERDASARKAN HASIL RAPAT TANGGAL.....

Bahwa untuk menjamin kelancaran pengembalian dana pinjaman proyek penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah Kami terima, kami telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. mengumpulkan cicilan pengembalian setiap bulan ke Bendahara KSM selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo penyetoran cicilan ke Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Karang Besuki.
2. Besarnya cicilan pengembalian setiap bulan adalah sebesar angsuran masing-masing anggota yang telah ditetapkan oleh BKM ditambah dengan tabungan kelompok sebesar Rp..... (sesuai kesepakatan anggota) per bulan.
3. Apabila karena terjadi sesuatu hal, salah satu dari anggota kelompok kami terpaksa melakukan penundaan pembayaran angsuran, maka untuk menutupi kekurangan angsuran ke BKM Karang Besuki sementara akan kami ambilkan dari tabungan kelompok.
4. Jangka waktu penggunaan dana tabungan kelompok oleh anggota kelompok untuk kebutuhan sebagaimana pada point (3) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo penyetoran cicilan ke UPK-BKM Karang Besuki.
5. Penggunaan dana tabungan kelompok dikhususkan hanya untuk cadangan menutupi kekurangan anggaran ke UPK-BKM Karang Besuki.
6. Dana kelompok akan diterimakan kembali ke anggota kelompok selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo terakhir penyetoran cicilan ke UPK-BKM Karang Besuki.

Demikian kesepakatan kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang.....

Ketua KSM

Bendahara KSM

()

()

Anggota KSM

Tanda Tangan

1.

()

2.

()

3.

()

PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG

Kami anggota KSM "....." Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab dengan system "tanggung Renteng" atas pengembalian pinjaman menurut jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

No	Nama Anggota	Alamat	Tanda tangan

Malang200...

Mengetahui
Ketua RT/RWMenyetujui
Ketua KSM

()

()

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Nama KSM :

Alamat KSM : RT.....RW..... Kelurahan Karangbesuki, Kec. Sukun Malang

Dengan ini mengaku bahwa saya telah menerima pinjaman dana P2KP dari BKM Karangbesuki, Kec. Sukun Malang, sebesar Rp.....(.....)yang diterimakan melalui KSM..... pada tanggal..... untuk keperluan usaha kami.

Atas hutang ini saya setuju untuk melaksanakan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Membayar pokok dan jasa pinjaman per bulan sesuai dengan jadwal.
2. Membayar biaya denda bila menunggak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melunasi hutang/pinjaman tersebut dalam jangka waktu... bulan, terhitung mulai bulan..... tahun.....
4. Apabila terjadi keterlambatan membayar/ketidaksanggupan maka saya memberi barang jaminan berupa..... yang sesuai dengan nilai sisa hutang/pinjaman saya termasuk pokok jasa dan denda-dendanya dan barang tersebut bias diambil oleh BKM Karangbesuki.
5. Apabila saya meninggal dunia, maka hutang/pinjaman atau sisa hutang/pinjaman saya akan dilunasi oleh ahli waris saya atau yang ditunjuk.
6. Apabila saya tidak dapat memenuhi butir 1-5 pada surat pengakuan ini, maka saya atau keluarga saya sanggup menerima sanksi apapun dan bersedia dihadapkan kepada pihak terkait.

Demikian Surat Pengakuan ini saya tanda tangani secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pengakuan ini dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pengakuan,

Saksi

(.....)
Peminjam

(.....)
Ketua KSM

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PEMOHONAN KARTU KELUARGA (Form - KK)

2. Untuk Kartin p[er]s[er]t[an] yang d[it]etapkan angka p[er]s[er]t[an]nya s[es]ua
Memb[er]i t[er]min j[er]as k[er]n[ya] L[et]ak d[is]c[us]p d[it] [t] [t] [t] pada k[er]n[ya] is[er]n k[er]n[ya]

Isian la[mb]ang X pada k[er]n[ya] j[er]n[an] A, B atau C)

PENGISIAN BIODATA KELUARGA

- 1. Untuk Kartin p[er]s[er]t[an] yang d[it]etapkan angka p[er]s[er]t[an]nya s[es]ua
- 2. Untuk Kartin p[er]s[er]t[an] yang d[it]etapkan angka p[er]s[er]t[an]nya s[es]ua
- 3. Untuk Kartin p[er]s[er]t[an] yang d[it]etapkan angka p[er]s[er]t[an]nya s[es]ua
- 4. Untuk Kartin p[er]s[er]t[an] yang d[it]etapkan angka p[er]s[er]t[an]nya s[es]ua
- 5. Untuk Kartin p[er]s[er]t[an] yang d[it]etapkan angka p[er]s[er]t[an]nya s[es]ua
- 6. Untuk Kartin p[er]s[er]t[an] yang d[it]etapkan angka p[er]s[er]t[an]nya s[es]ua
- 7. Untuk Kartin p[er]s[er]t[an] yang d[it]etapkan angka p[er]s[er]t[an]nya s[es]ua
- 8. Untuk Kartin p[er]s[er]t[an] yang d[it]etapkan angka p[er]s[er]t[an]nya s[es]ua

KOLOM 1 : NOMOR USUL
 1. Jarak Persebaran : A. 2-30
 2. Jarak Persebaran : B. 31-60
 3. Jarak Persebaran : C. 61-90
 4. Jarak Persebaran : D. 91-120
 5. Jarak Persebaran : E. 121-150
 6. Jarak Persebaran : F. 151-180
 7. Jarak Persebaran : G. 181-210
 8. Jarak Persebaran : H. 211-240

KOLOM 2 : JENIS KELUARGA
 1. Kepala Keluarga
 2. Kepala Keluarga
 3. Kepala Keluarga
 4. Kepala Keluarga
 5. Kepala Keluarga
 6. Kepala Keluarga
 7. Kepala Keluarga
 8. Kepala Keluarga

KOLOM 3 : JENIS KELUARGA
 1. Kepala Keluarga
 2. Kepala Keluarga
 3. Kepala Keluarga
 4. Kepala Keluarga
 5. Kepala Keluarga
 6. Kepala Keluarga
 7. Kepala Keluarga
 8. Kepala Keluarga

KOLOM 4 : HUBUNGAN KELUARGA (Jenis) : angka p[er]s[er]t[an]nya
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 5 : ANAK KE
 0 1 Anak Ke
 0 2 Anak Ke
 0 3 Anak Ke
 0 4 Anak Ke
 0 5 Anak Ke
 0 6 Anak Ke
 0 7 Anak Ke
 0 8 Anak Ke
 0 9 Anak Ke

KOLOM 6 : JENIS KELUARGA
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 7 : JENIS KELUARGA
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 8 : JENIS KELUARGA
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 9 : JENIS KELUARGA
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 10 : JENIS KELUARGA
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 11 : JENIS KELUARGA
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 12 : JENIS KELUARGA
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 13 : JENIS KELUARGA
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 14 : JENIS KELUARGA
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 15 : JENIS KELUARGA
 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Kepala Keluarga
 0 3 Kepala Keluarga
 0 4 Kepala Keluarga
 0 5 Kepala Keluarga
 0 6 Kepala Keluarga
 0 7 Kepala Keluarga
 0 8 Kepala Keluarga
 0 9 Kepala Keluarga

KOLOM 16 : STATUS PERDIAN, di situ tertera statusnya
 1. Kuli
 2. Buruh
 3. Petani
 4. Pedagang
 5. Pegawai
 6. TNI
 7. Polri
 8. Lainnya

KOLOM 17 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya

KOLOM 18 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya

KOLOM 19 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya

KOLOM 20 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya

KOLOM 21 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya

KOLOM 22 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya

KOLOM 23 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya

KOLOM 24 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya

KOLOM 25 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya

KOLOM 26 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya

KOLOM 27 : KETERANGAN PERDIAN (Diisi dengan statusnya)
 1. Belum
 2. Sudah
 3. Lainnya



Proyek
Penanggulangan
Kemiskinan
perkotaan



BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
(BKM) KARANGBESUKI SUKUN
Akte Notaris : Nomor 02 Tgl 16 Februari 2000
Sekretariat Jl. Raya Candi III/450
Telp.(0341)587757

SURAT PERJANJIAN

No. /BKM – K/SKN/ 2000...

Yang Bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :

Alamat :

K S M :

Berdasarkan data yang ada pada UPK, sampai pada hari :
tanggal Bulan : Tahun : Bahwa saya
masih memiliki tunggakan pada BKM Karangbesuki sebesar Rp.....

Dengan ini saya sanggup melunasi tanggungan tersebut diatas pada:.....
Atau dengan jalan mengangsur setiap:.....sebesar Rp.....

Demikian surat perjanjian ini sayabuat atas dasar kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Mengetahui
Pengurus BKM

Malang, 200...
Pembuat Perjanjian,

()

()

KSM LALAPAN
KELURAHAN KARANGBESUKI KEC. SUKUN
KOTA MALANG

A. Profil KSM

- Nama KSM = Lalapan
- Jumlah Anggota = 29 orang
- Jenis KSM = Usaha Sejenis
- Jenis Usaha = warung nasi
- Total Pinjaman = Rp 16.700.000,00
- Masa Pengembalian = 12 bulan
- Besar Cicilan = Rp 1.642.200,00
- Bunga pinjaman = 1,5 % per bulan
- Tujuan Penggunaan Bantuan = Untuk Penambahan modal Usaha yang Sudah ada

B. Proses Pembentukan KSM

- Sebelum Proyek P2KP masuk di kelurahan Karangbesuki usaha ini sudah ada dan sudah berjalan.
- Masyarakat Karangbesuki mengetahui program P2KP dari sosialisasi yang dilakukan oleh Faskel (untuk pertama kali). Setelah mereka mengetahui dan paham akan proyek ini maka mereka membentuk KSM, karena mereka membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya.
- Semua dari anggota KSM tersebut adalah warga RW 03 yang sebelumnya memang sudah saling mengenal, sehingga untuk interaksi sehari-hari mereka tidak kesulitan. Ketua KSM Lalapan yang memang tokoh masyarakat di PKK sangat bertanggung jawab dan ingin membantu dari warga di sekitarnya (khususnya banyak yang terjerat dengan bank harian).
- Setelah itu mereka bermusyawarah untuk menentukan pengurusan KSM.

C. Penyusunan Usulan/Proposal

- Setelah adanya kesepakatan dengan seluruh anggota KSM dalam menentukan kepengurusan KSM, maka ketua kelompok bersama dengan beberapa anggotanya

membahas tentang pembuatan usulan, dibantu dengan Faslel dan Kader Masyarakat.

- Selesai pembuatan usulan kegiatan, berkas usulan disampaikan ke BKM untuk selanjutnya dinilai kelayakannya oleh KMW dan disurvei oleh BKM.

D. Pelaksanaan Kegiatan Usaha/Penggunaan Dana

- Setelah dana diterima, seluruh anggota KSM langsung mempergunakan dana yang diterima untuk mengembangkan usahanya.
- Dalam pelaksanaannya, ada juga anggota KSM yang menggunakan pinjamannya untuk menutupi pinjaman di Bank Harian, tetapi sebagian juga untuk menambah modal usaha.
- Walaupun mereka satu RW, dan banyak sekali yang mempunyai usaha warung nasi tetapi persaingan mereka tetap sehat, bahkan saling memberi saran antar anggota untuk pengembangan usahanya. Hal ini juga di dukung oleh konsumen yang cukup banyak karena wilayah ini adalah wilayah kos (sekitar kampus).

E. Komitmen Pengembalian Pinjaman

- Sesuai dengan kesepakatan bahwa semua anggota KSM menyetorkan cicilan pinjaman sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
- Karena jumlah anggota KSM yang sangat banyak maka untuk pembayaran angsuran anggota dibagi 6 (enam) sub kelompok. Kemudian koordinator Sub Kelompok menyerahkan kepada ketua Kelompok sekaligus berkoordinasi untuk perkembangan KSM Lalapan.
- Pengembalian/angsuran dilakukan oleh ketua kelompok kepada UPK-BKM.
- Setiap pengembalian angsuran memperoleh bukti pembayaran (bukti kas masuk) dari UPK.

F. Manfaat Yang Dirasakan

- Setelah mendapatkan bantuan dari P2KP penghasilan mereka lebih meningkat dibanding sebelumnya.
- Dapat membantu warga yang terjerat dengan bank harian agar keluar dari masalah yang dihadapinya.
- Dengan adanya KSM Lalapan ini, menambah keakraban sesama anggota karena seringnya ketemu dan komunikasi.



Nomor : 1209 /J25.3.1/PL.5/2006
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Jember, 10 Oktober 2006

Kepada Yth. : Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan
 Pertindungan Masyarakat
 Pemerintah Kota Malang
 di -

MALANG

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 3982/J25.1.2/PL.5/2006 tanggal 07 Oktober 2006, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Ketua Peneliti / NIP	FITRI AMILLIA SARI / 02 - 2041
Fakultas / Jurusan	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Niaga
Alamat	: Jl. Jawa VIII / No.5 Jember (0331) 336859
Judul Penelitian	: Strategi dan Kebijakan Unit Pengelola Keuangan – Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK – BKM) dalam Penyaluran Kredit Guna Mencapai <i>Self-Sustainable</i> di Kota Malang
Lokasi	: Unit Pengelola Keuangan – Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK – BKM) Kota Malang
Lama Penelitian	: 2 (dua) bulan

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih



Ketua,

Drs. Kusdo, DEA, Ph.D
NIP. 131 592 357Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas I.S.I.P
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA MALANG
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
 Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 366252
MALANG

Kode Pos 65119

Malang, 11 Desember 2006

Kepada Sdr. 1. Kepala BAPPEKO

2. Camat Lowokwaru

3. Camat Sukun

4. Camat Klojen

di

MALANG

: 072/970/35.73.405/2006

: -

: Penelitian/Survey/Research

Menunjuk Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember

Tanggal : 10 Oktober 2006

Nomor : 1209/J25.3.1/PL.5/2006

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Fitri Amillia Sari

Alamat : Jl. Jawa VIII No. 5 Malang

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian/Survey/Research

Judul : Strategi dan Kebijakan Unit Pengelola Keuangan- Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK – BKM) dalam Penyaluran Kredit Guna Mencapai Self-Sustainable di Kota Malang

Pembimbing : 1. Dra. Hj. Sulistyaningsih
 2. Drs. H. Sugeng Iswono, MA

Peserta : -

Waktu : 2 (dua) bulan

Lokasi : Pemerintah Kota Malang

Peneliti wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Dinas/Badan/ Kantor/Bagian Instansi setempat.

Demikian harap menjadikan maklum.

an, KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
 KOTA MALANG

Kepala Bagian Tata Usaha



MBUSAN : Kepada Yth
 dr. Ketua Lembaga Penelitian Univ Jember
 yang bersangkutan

Pembina, Tingkat I
 NIP. 380-032 860



BKMMERJOSARI
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN MERJOSARI
Sekretariat : Jl Juyo Tambaksari no 1
Telp. 0341.7325360
Merjosari - Lowokwaru - Malang 65144

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ketua BKM Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Amillia Sari

Alamat : Jl Jawa VI No 20 Jember

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Telah mengadakan penelitian/ Survey/ Reseach :

Judul : Strategi dan kebijakan Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK- BKM) dalam penyaluran Kredit Guna mencapai Self Sustainable di Kota Malang

Pembimbing : 1. Dra. Hj .Sulistyaningsih
2. Drs.H. Sugeng Iswono ,Ma

Tempat Research : BKM Merjosari Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang

Lamanya : 11 Desember- 28 Desember 2006

Demikian surat keterangan ini dibuat ,untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Desember 2006

Ketua BKM Merjosari



LATIF WAHYUDI



Nomor : 2668/J25.1.2./Pl.5/2006
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Jember, 10 Juli 2006

Kepada yth: Sdr. Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

.....
Kabupaten Malang
Di
Malang



Dengan hormat,
Dalam Rangka Hibah Penelitian PHK A2 Program Studi Administrasi Niaga FISIP Universitas Jember Tahun 2006, maka kami mohon kesediaan saudara memperkenankan penelitian bagi dosen FISIP Universitas Jember, adapun dosen tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs.Akhmad Toha, M. Si
(NIP. 131 658 393)
Anggota : 1. Dwi Sungkowo, S. Sos, MP
(NIP. 132 094 127)
2. Drs. Mudh'ar Syarifudin, M. Si
(NIP. 131 577 295)
Judul : Kinerja Dan Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro Unit
Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
(UPK - BKM - P2KP) Kota Malang.

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.



Dekan,
Dr.H. Uung Nasdia, B. Sw., MS
NIP. 130 674 836